



PERAN ANGGOTA DPR RI DALAM PENGUATAN DIPLOMASI PARLEMEN

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

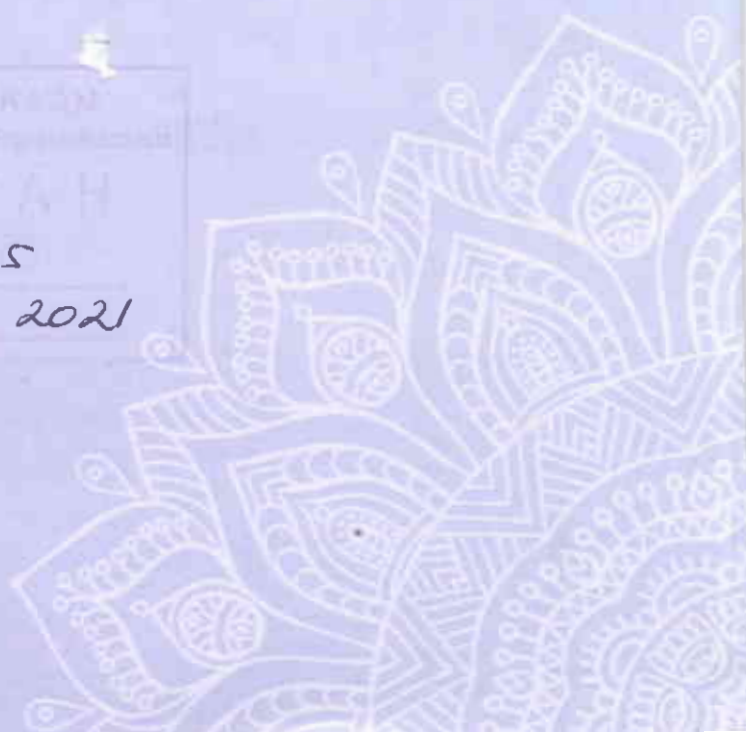
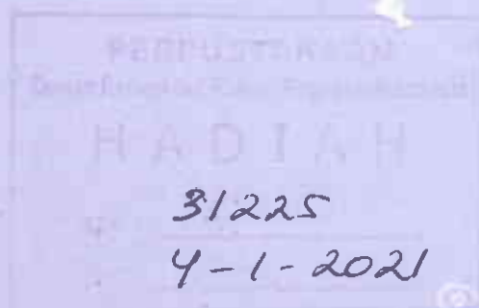
308

148



DAFTAR ISI LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN





Peran Anggota DPR RI
dalam Penguatan Diplomasi Parlemen
pada tahun 2019





**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2018 - 2019
TANGGAL 7 JANUARI S/D 3 MARET 2019**

1. 29 Januari – 4 Februari 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Papua Nugini
2. 7 – 13 Februari 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Turki

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2018-2019
TANGGAL 4 MARET S/D 7 MEI 2019**

3. 13 – 19 Maret 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Amerika Serikat

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2018-2019
TANGGAL 8 MEI S/D 15 AGUSTUS 2019**

4. 17 – 23 Juni 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Republik Ceko
5. 23 – 29 Juni 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Kuba
6. 1 – 7 Juli 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Republik Ceko
7. 1 – 7 Juli 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Amerika Serikat
8. 5 – 11 Juli 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Selandia Baru
9. 17 – 23 Juli 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Swedia
10. 18 – 24 Juli 2019 Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Swiss
11. 21 – 27 Juli 2019 Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Papua Nugini
12. 21 – 27 Juli 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Inggris
13. 9 – 15 Agustus 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Papua Nugini
14. 11 – 17 Agustus 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Inggris
15. 18 – 24 Agustus 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Swiss
16. 18 – 24 Agustus 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Kroasia
17. 18 – 24 Agustus 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Papua Nugini
18. 18 – 24 Agustus 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Ekuador
19. 19 – 25 Agustus 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Republik Ceko
20. 19 – 25 Agustus 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Selandia Baru
21. 21 – 26 Agustus 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Republik Turki
22. 21 – 27 Agustus 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Selandia Baru
23. 25 – 31 Agustus 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Papua Nugini
24. 25 – 31 Agustus 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Yunani
25. 25 – 31 Agustus 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Republik Ceko
26. 1 – 7 September 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Selandia Baru
27. 1 – 7 September 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Inggris
28. 7 – 13 September 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Thailand
29. 2 – 8 September 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Italia
30. 8 – 14 September 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Maroko
31. 15 – 21 September 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Australia
32. 18 – 24 September 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Afrika Selatan
33. 18 – 24 September 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Selandia Baru
34. 19 – 25 September 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Malaysia
35. 19 – 25 September 2019, Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Ekuador



Peran Anggota DPR RI
dalam Penguatan Diplomasi Parlemen
pada tahun 2019





KATA PENGANTAR

Ir. H. Achmad Hafisz Thohir
Wakil Ketua BKSAP
F-PAN





Assalamualaikum wr. wb.

Salam sejahtera untuk saudara-saudaraku sekalian.

Pelibatan anggota parlemen dalam diplomasi dan politik internasional bukan merupakan hal baru. Sejak terbentuknya Liga Bangsa Bangsa yang merupakan cikal bakal Persatuan Bangsa-Bangsa, anggota parlemen telah memainkan peran penting dalam pergaulan antar bangsa. Peran diplomasi kemudian menjadi semakin relevan di tengah kondisi dunia yang terkoneksi satu sama lain seakan tanpa sekat batas negara. Aktivitas politik tidak lagi hanya terbatas dalam lingkup negara tetapi merambah lingkup kawasan bahkan antar kawasan seiring meningkatnya intensitas kerjasama antar negara.

Berbagai dokumen internasional telah mengakui signifikansi peran anggota parlemen dalam diplomasi. Salah satunya adalah Declaration on the Parliamentary Vision for International Cooperation at the Dawn of the Third Millennium yang disepakati Inter Parliamentary Union (IPU) di tahun 2000. Poin penting yang disampaikan melalui Deklarasi tersebut adalah dorongan bagi anggota parlemen untuk mengembangkan kegiatan diplomasi parlemen serta memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral. Anggota parlemen memiliki modal strategis untuk membumikan kesepakatan-kesepakatan internasional sekaligus menjadi jembatan dalam membawa aspirasi konstituen ke kancah global.

Dalam negara demokrasi, legislatif memiliki fungsi yang efektif untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri yang diambil eksekutif. Di negara kita, peran serta anggota DPR RI dalam diplomasi semakin mengemuka setelah secara lugas diatur melalui Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat berkedudukan sebagai lembaga negara dan memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Fungsi diplomasi selanjutnya diatur dalam Pasal 219 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib bahwa DPR RI ikut berperan dalam mendukung upaya diplomasi dalam pelaksanaan politik luar negeri

sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian pengantar singkat dari saya untuk memberikan konteks bagi laporan kerja diplomasi perorangan yang dijalankan para anggota DPR RI. Terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan anggota DPR RI yang telah melaksanakan kunjungan perorangan dengan baik dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu. Apresiasi saya sampaikan pula kepada Sekretariat Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota DPR RI (Minluna) yang telah membantu para anggota DPR RI sejak persiapan keberangkatan hingga menganalisa laporan-laporan kunjungan perorangan yang disampaikan para anggota DPR RI. Poin-poin penting yang terangkum dalam buku ini kiranya dapat menjadi lesson learned bagi kita semua.

Ke depannya saya melihat dengan semakin kompleks tatanan dunia dan tantangan yang dihadapi, maka dibutuhkan kesiapan yang lebih baik lagi. Saat ini saya dibantu dengan rekan-rekan Sekretariat Minluna Biro KSAP tengah menata prosedur implementasi pelaksanaan diplomasi anggota DPR RI. Perbaikan di berbagai aspek tentunya akan terus kami lakukan. Harapannya DPR RI akan memiliki standar kunjungan diplomasi perorangan dan sistem pelaporan yang lebih baik lagi.

Wassalamualaikum wr. wb.

Jakarta, Januari 2020

Ir. H. Achmad Hafisz Tohir
Wakil Ketua BKSAP DPR RI





1 LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2018 - 2019 TANGGAL 7 JANUARI S/D 3 MARET 2019





Peran Anggota DPR RI
dalam Penguatan Diplomasi Parlemen
pada tahun 2019





KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE PAPUA NUGINI TANGGAL 29 JANUARI - 4 FEBRUARI 2019

SUSUNAN DELEGASI



Dr. Anton Sihombing
Ketua Delegasi / F-PG



Hj. Eva Hartati, S.I.P., MM
Anggota Delegasi / F-PDIP



Amran, SE
Anggota Delegasi / F-PAN

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI ke Papua Nugini pada tanggal 29 Januari – 4 Februari 2019 dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung isu-isu yang menjadi perhatian di Papua Nugini dan Republik Kepulauan Salomon.

Dalam pertemuan antara delegasi Anggota DPR RI dengan Kedutaan Besar RI untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon, beberapa masalah penting yang menjadi perhatian, antara lain:

1. Mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia di Papua Nugini.
Diperkirakan WNI yang berada di PNG dan Rep Kepulauan Salomon, berkisar 1500 orang. Kasus yang paling banyak ditemukan adalah:
 - Buruh migran asal Indonesia yang tidak dibayarkan hak-haknya oleh para penyedia lapangan kerja, khususnya yang berada di Kepulauan Salomon.
 - Sulitnya pihak KBRI mendata jumlah WNI yang berada di Papua Nugini dan Republik Kepulauan Salomon yang menjadi pekerja, mengingat banyak diantara mereka yg tidak melaporkan diri, pada saat kedatangan mereka di PNG dan Republik Kepulauan Salomon.
 - Kasus Ketenagakerjaan banyak terjadi di Republik Kepulauan Salomon, dimana para WNI banyak bekerja di sektor Kehutanan sehingga tidak terpantau oleh KBRI.



2. Di bidang kerjasama pendidikan dan kebudayaan, KBRI pada bulan Februari 2019 telah memberikan 30 beasiswa bagi warga Papua Nugini untuk belajar di Indonesia. Selain itu, diberikan pula pengajaran bahasa Indonesia bagi warga Papua Nugini. Kerjasama di bidang pendidikan dan kebudayaan ini telah berlangsung cukup lama.
3. Dalam hal Jaminan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Papua Nugini memberikan layanan bebas biaya kepada seluruh warga negaranya meskipun fasilitas kesehatan sangat minim kualitasnya. Layanan kesehatan gratis adalah suatu ide yang bisa dicontoh oleh Indonesia.
4. Masalah keamanan
 - Masalah keamanan masih menjadi kendala di Papua Nugini. Salah satu sebabnya adalah angka pengangguran yang sangat tinggi dengan perkiraan lebih dari 40% dari jumlah penduduk.
 - Pergerakan Organisasi Papua Merdeka yang bergerak bebas di Papua Nugini, juga menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan Staf KBRI secara umum. Anggota organisasi Papua Merdeka yang berada di semua Kawasan Melanesian Spearhead Group (MSG) yaitu Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, dan Kaledonia Baru, sering mengadakan konsolidasi untuk mengajukan resolusi Referendum Kemerdekaan Papua, kepada Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).
5. Peluang kerjasama
Peluang kerjasama yang bisa dilakukan Papua Nugini - Indonesia antara lain : i) bidang pengamanan obat dan makanan; ii) perdagangan; iii) peningkatan kerja sama di bidang pendidikan kebudayaan; serta iv) keamanan dan pertahanan, mengingat letak geografis Papua Nugini yang berbatasan langsung dengan Indonesia.



*Pertemuan Delegasi dengan Acting Duta Besar RI
di Port Moresby, Papua Nugini*

REKOMENDASI

- Dalam hal ketenagakerjaan yang menyangkut pekerja migran Indonesia, diperlukan keterlibatan dan koordinasi KBRI dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI/BNP2TKI sebagai badan yang berfungsi untuk perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri.
- KBRI perlu mendapat tambahan tenaga keamanan yang memadai, mengingat anggota gerakan OPM di PNG dan para simpatisannya sangat lah signifikan jumlahnya, dan ini bisa mengancam keselamatan para diplomat. Anggota OPM juga sering mengadakan gerakan politik di PNG, karena memperoleh kebebasan dari pemerintah lokal.



KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE TURKI TANGGAL 7 - 13 FEBRUARI 2019

SUSUNAN DELEGASI



Muhammad Nur Purnamasidi
Ketua Delegasi / F-PG

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI ke Turki pada tanggal 7 – 13 Februari 2019 bertujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan politik antara Indonesia dan Turki. Dalam pertemuan dengan Duta Besar RI di Turki dijelaskan beberapa hal antara lain:

1. Bidang Ekonomi

Indonesia dapat memanfaatkan Turki sebagai pintu masuk ke pasar Timur Tengah, Eropa Selatan dan Afrika Utara. Sebaliknya, Turki dapat menjadikan Indonesia sebagai basis untuk memasuki pasar ASEAN yang berpenduduk 600 juta jiwa maupun Kawasan Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP sebesar 3,5 miliar jiwa. Produk Indonesia dinilai sangat kompetitif di Turki. Kondisi ekonomi dunia saat ini menyebabkan perekonomian Turki lebih terdampak dibandingkan Indonesia. Sebaliknya kinerja ekonomi Indonesia yang relatif baik telah menarik perhatian pelaku bisnis Turki. Kedua negara juga mempunyai mekanisme kerja sama ekonomi melalui Joint Commission for Economic and Technical Cooperation between the Republic of Indonesia and the Republic of Turkey (KBIT).

2. Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki terjalin sangat baik, dan jauh lebih kuat. Ini terbukti dengan adanya pertemuan rutin dan kontak antara para pemimpin, menteri dan pejabat pemerintah, politisi, akademisi dan mahasiswa, serta para pelaku bisnis yang intensif.



*Pertemuan Delegasi DPR RI
dengan Duta Besar Indonesia
untuk Turki*

REKOMENDASI

Indonesia dan Turki bersepakat mempercepat penyelesaian Comprehensive Economic Partnership Agreement atau perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (CEPA) kedua negara karena CEPA yang sedang dirundingkan saat ini dapat menjadi insentif untuk mendorong tidak saja perdagangan kedua negara, tetapi juga investasi dua arah yang saling menguntungkan. CEPA antara kedua negara dapat mendongkrak nilai perdagangan kedua negara dan mendorong investasi dua arah. IT-CEPA diprediksi bisa berdampak peningkatan perdagangan cukup signifikan. Duta Besar LBBP RI di Ankara, bersedia memfasilitasi komunikasi dengan pihak Turki baik dalam mendorong penyelesaian perundingan CEPA, maupun melaporkan hambatan-hambatan perdagangan yang dihadapi Indonesia di pasar Turki kepada Kementerian Perdagangan di Jakarta.



2

LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA
PERORANGAN

MASA PERSIDANGAN IV
TAHUN SIDANG 2018 – 2019
TANGGAL 4 MARET S/D 7 MEI 2019





Peran Anggota DPR RI
dalam Penguatan Diplomasi Parlemen
pada tahun 2019





KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE AMERIKA SERIKAT TANGGAL 13 - 19 MARET 2019

SUSUNAN DELEGASI



DR. H. Sarehwiyono M, SH., MH
Ketua Delegasi / F-PGerindra



DR. H. Azikin Solthan, M.Si
Anggota Delegasi / F-PGerindra



Fadhullah
Anggota Delegasi / F-PGerindra



Ir. Salomo Hutabarat
Anggota Delegasi / F-PGerindra



Ir. Taslim Azis
Anggota Delegasi / F-PGerindra

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI ke Amerika Serikat pada tanggal 13-19 Maret 2019 dilakukan untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dan APBN, termasuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas Duta Besar dan Perwakilan Tetap RI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan program Pemerintah. Adapun poin-poin hasil kunjungan antara lain:



Pertemuan dengan KJRI Los Angeles

1. Bidang Perdagangan

Los Angeles sebagai salah satu pusat dunia bisnis, perdagangan internasional, hiburan, budaya, media, mode, ilmu pengetahuan, olahraga, teknologi dan pendidikan terdepan serta merupakan kota terkaya ketiga di dunia dan kota paling kuat dan berpengaruh kelima di dunia, sangat berpotensi membuka peluang investasi dan ekspor Indonesia. Untuk itu, diperlukan usaha bersama secara sistematis dan komprehensif antara KJRI Los Angeles, DPR RI, Kementerian Perdagangan untuk bekerja sama dalam hal peningkatan promosi produk Indonesia di Amerika. Kementerian Perdagangan agar dapat memberi perhatian yang lebih besar terhadap kegiatan promosi produk-produk unggulan Indonesia di luar negeri. Pada kesempatan ini juga delegasi meninjau pusat promosi perdagangan produk Indonesia di KJRI Los Angeles.

2. WNI dan masalah Keimigrasian

WNI yang berdomisili di wilayah Konsulat Jenderal Los Angeles berdasarkan data terbaru kurang lebih 56 ribu orang. Secara umum, tidak banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak konsulat. Deportasi adalah masalah yang paling sering terjadi dikarenakan overstay atau kelebihan ijin tinggal di Amerika. Pada tahun 2018 ada 2.265 orang WNI yang mengajukan permohonan pembuatan/perpanjangan paspor. Tercatat juga ada sekitar 1.116 orang WNI pemohon Visa. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh pihak Konsulat adalah adanya WNI yang sudah menjadi warga negara Amerika (citizen) akan tetapi belum melakukan lapor diri ke Konsulat.

Sejak bulan Januari 2015, KJRI Los Angeles telah memberlakukan Sistem Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), sehingga pencetakan paspor di KJRI Los Angeles telah tersambung langsung dengan Pusat Data Keimigrasian Ditjen Imigrasi di Jakarta, dan pengambilan sidik jari serta foto pemohon



Pertemuan dengan Konsul Jenderal Los Angeles, KPU dan Bawaslu

paspor sudah berbasis biometrik. Dengan sistem ini pelayanan pembuatan paspor menjadi lebih cepat dan akurat.

3. Persiapan Pemilu di Luar Negeri

Dalam rangka meninjau kesiapan pelaksanaan Pemilu 2019, Delegasi DPR RI mengadakan pertemuan dengan pihak KJRI, perwakilan KPU dan Bawaslu. Daftar Pemilih Tetap (DPT) ada 12.984 orang WNI yang sudah tercatat untuk memilih pada Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019. Sebagian besar pemilih tersebut akan memilih melalui Pos dikarenakan masalah domisili yang jauh dan juga masalah jam kerja dimana para pemilih harus tetap bekerja. 602 orang WNI akan melakukan pencoblosan langsung ke 2 TPS di kantor Konsulat. Sosialisasi tentang Pemilu telah dilakukan jauh hari melalui sosial media. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilu antara lain pengiriman kertas suara melalui Pos kadang tidak sampai ke tangan calon pemilih dikarenakan adanya WNI yang pindah ke alamat ke negara bagian lain dan tidak melaporkan diri ke Konsulat. Akibatnya banyak kertas suara yang terbuang sia-sia karena tidak terpakai (sekitar 10-20%).

REKOMENDASI

Lembaga Eksekutif Pemerintahan terkait dapat memaksimalkan langkah-langkah dan strategi untuk menjemput potensi investasi strategis di beberapa negara bagian Amerika.





3

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN

MASA PERSIDANGAN V
TAHUN SIDANG 2018 - 2019
TANGGAL 8 MEI S/D 15 AGUSTUS 2019





Peran Anggota DPR RI
dalam Penguatan Diplomasi Parlemen
pada tahun 2019





KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE REPUBLIK CEKO TANGGAL 17 - 23 JUNI 2019

SUSUNAN DELEGASI



Marwan Cik Asan
Ketua Delegasi / F-PD



H. Mukhamad Misbakhun, SE., MH
Anggota Delegasi / F-PG



Drs. Agun Gunandjar Sudarsa
Anggota Delegasi / F-PG



Sartono
Anggota Delegasi / F-PD

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan kerja perorangan yang dilaksanakan oleh Anggota DPR RI ke Republik Ceko pada tanggal 17 – 23 Juni 2019 ini diselenggarakan terutama untuk membangun kerja sama bilateral antara dua negara, yaitu Indonesia dengan Republik Ceko, baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, perdagangan, pendidikan, pertanian, sosial, budaya, pariwisata, olahraga, dan bidang-bidang penting lainnya. Adapun poin-poin pertemuan sebagai berikut :



1. Bidang Perdagangan

KBRI di Republik Ceko telah melakukan berbagai terobosan dan langkah konkret untuk mempromosikan produk-produk Indonesia di mata dunia, khususnya di Republik Ceko. Salah satunya adalah bekerja sama dengan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Budapest. Beberapa produk Indonesia yang dipamerkan adalah kopi, teh, kakao, minyak sawit mentah, dan produk kesehatan, produk gula semut, produk spa, lem, batik, produk makan dan minum, tas kulit, kabel, produk sarung tangan, serta pariwisata Indonesia. Pameran produk-produk Indonesia tersebut merupakan bagian dari diplomasi ekonomi.

2. Hubungan Bilateral

Hubungan politik antara Indonesia dan Ceko berjalan dengan baik hingga saat ini dan terus mengalami kemajuan bahkan makin erat dari tahun ke tahun. Hal ini tidak lepas dari peran KBRI Ceko yang selalu melakukan koordinasi dan melibatkan pemerintah Ceko dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh KBRI, baik dalam even HUT Kemerdekaan RI maupun dalam bentuk pameran produk-produk Indonesia yang diadakan di Republik Ceko. Selain itu disebabkan juga oleh sistem politik di Ceko yang terbuka dan kebijakan Indonesia yang lebih memperhatikan negara-negara di wilayah Eropa Tengah dan Timur. Dan untuk lebih meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Republik Ceko, kedua negara melakukan pertemuan konsultasi dari waktu ke waktu untuk mendiskusikan perkembangan bilateral kedua negara dan isu-isu regional dan global yang menjadi perhatian kedua negara.

3. Bidang Pariwisata

Di bidang pariwisata, dukungan promosi dan branding dari pemerintah Republik Ceko membuat negara ini semakin dikenal. Mengadakan festival merupakan salah satu cara yang dilakukan sebagai sarana promosi wisata. Dengan adanya festival tahunan inilah, para wisatawan bisa dijangkau dalam periode waktu tertentu. Tidak mengherankan jika pariwisata menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang efektif. Hal ini dapat dijadikan contoh dalam memajukan pariwisata di Indonesia. KBRI dan masyarakat Indonesia yang berada di Ceko juga aktif dalam mempromosikan destinasi pariwisata yang ada di Indonesia.

4. Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, Indonesia dan Republik Ceko juga sedang ditingkatkan, terutama terkait pertukaran pelajar dan kemudahan mahasiswa Indonesia untuk belajar di Ceko dan sebaliknya kemudahan warga negara Ceko ketika belajar di Indonesia.

5. Sistem Transportasi

Walaupun terbilang kota dengan bangunan-bangunan tua, tetapi dalam hal transportasi public, Praha ternyata memiliki tingkat penggunaan transportasi publik tertinggi di dunia, dengan 1,2 miliar perjalanan penumpang per tahun. Infrastruktur transportasi umum di Praha sudah tertata rapih dan terintegrasi satu sama lain. Indonesia bisa mengembangkan potensi pariwisata seperti di Ceko dengan mengembangkan sistem marketing dari setiap lokasi wisata dan infrastruktur penunjang pariwisata. Pengembangan strategi marketing dari setiap lokasi wisata sangat penting dan yang paling penting adalah kelengkapan infrastruktur pendukung sektor pariwisata



REKOMENDASI

- Hubungan bilateral Indonesia-Ceko yang telah berjalan dengan baik harus terus dijaga, dirawat dan ditingkatkan sehingga lebih memberikan manfaat di dua belah pihak baik Republik Indonesia maupun Republik Ceko terutama disektor ekonomi dan perdagangan, ekspor dan impor, investasi dan penanaman modal, kerja sama dalam bidang teknologi dan alat-alat militer.
- Indonesia dengan komoditas perkebunan unggulan kopi tentu harus lebih aktif dan proaktif mempromosikan produk kopi ini di Republik Ceko dimana sektor ini mempunyai pangsa pasar yang sangat bagus di Republik Ceko.
- Meningkatkan promosi di sektor kebudayaan dan perkebunan melalui berbagai pameran di Ceko. Pemerintah Indonesia dan pengusaha Indonesia harus lebih gencar memberikan porsi yang lebih besar dalam promosi dan kerjasama dengan Republik Ceko.



Peran Anggota DPR RI
dalam Penguatan Diplomasi Parlemen
pada tahun 2019





KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE KUBA TANGGAL 23 - 29 JUNI 2019

SUSUNAN DELEGASI



dr. Hj. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ
Ketua Delegasi / F-PD

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI ke Kuba tanggal 23 – 29 Juni 2019 bertujuan untuk melaksanakan diplomasi parlemen mengenai pelaksanaan kebijakan pemerataan kualitas kesehatan, keadilan sosial, kapasitas pendidikan kedokteran, dan sistem pelayanan kesehatan publik. Poin-poin hasil kunjungan yang menjadi perhatian antara lain:

1. Bidang Kesehatan

- Sebagai negara berkembang, sistem kesehatan Kuba termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Sistem kesehatan Kuba digunakan sebagai contoh kebijakan dan kualitas kesehatan yang baik bagi negara lain di dunia terutama di benua Amerika. Prestasi Kuba dalam bidang kesehatan sangat luar biasa. Angka kematian bayi (infant mortality rate) di Kuba dibawah 5 (4.2) per 1000 kelahiran. Cakupan program imunisasi di Kuba juga mencapai 99 persen. Alhasil, sejak 1979 Kuba terbebas dari difteri, campak, batuk rejan, polio, tetanus, demam tifoid, dan penyakit menular lainnya. Kuba juga memiliki kapasitas riset medis yang baik, sebagian besar produk kesehatan yang digunakan di Kuba adalah hasil riset dan produksi yang dilakukan di Kuba sendiri.
- Sesuai dengan konstitusi Kuba, layanan kesehatan bersifat universal dan gratis. Karenanya 99% kelahiran anak di Kuba dilakukan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan negara. Sistem kesehatan Kuba juga bisa menjangkau hampir seluruh penduduk tanpa diskriminasi.
- Dalam pencegahan penyakit, Kuba memiliki konsep Medicina General Integral (MGI) yang fokus pada penciptaan lingkungan sehat dan menjauhkan rakyat dari penyakit.

2. Hubungan Bilateral

- Diplomasi Indonesia-Kuba telah dimulai sejak tahun 1960 yang ditandai dengan kunjungan Presiden Soekarno ke ibu kota Kuba, Havana. Sejak saat itu Kuba dan Indonesia terus menjalin hubungan baik dalam berbagai bidang terutama kesehatan dan olahraga.



REKOMENDASI

- Kunjungan tersebut dapat memberikan kontribusi/masukan dalam pengawasan dan mengatasi permasalahan kesehatan di Indonesia, seperti dalam pemberdayaan SDM dalam riset-riset dan anggaran sarana dan prasarana riset yang memadai.
- Mensosialisasikan kembali program imunisasi untuk menekan angka kematian bayi di Indonesia.
- Kemudahan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, tanpa adanya diskriminasi.



Nova Riyanti Yusuf, Anggota DPR RI melakukan diskusi pelayanan kesehatan dan berkunjung ke salah satu fasilitas kesehatan di Kuba



KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE REPUBLIK CEKO TANGGAL 1 - 7 JULI 2019

SUSUNAN DELEGASI



H. Irmadi Lubis
Ketua Delegasi / F-PDIP



Nyoman Dhamantra
Anggota Delegasi / F-PDIP



Agus Susanto
Anggota Delegasi / F-PDIP



Rachmat Nasution Hamka
Anggota Delegasi / F-PDIP



Hi. Denny Jaya Abri Yani
Anggota Delegasi / F-PDIP



Drs. Y. Jacki Uly, MH
Anggota Delegasi / F-NASDEM



H. Endre Sjaifoel
Anggota Delegasi / F-NASDEM



Hj. Titik Prasetyowati Verdi, SH., MH
Anggota Delegasi / F-NASDEM



Beni Sudrajat
Anggota Delegasi / F-NASDEM



Zulkifli Anwar
Anggota Delegasi / F-PD



Mohammad Hatta
Anggota Delegasi / F-PAN



Wa Ode Nur Zainab
Anggota Delegasi / F-PAN



H. Syaikhul Islam, Lc., M.Sosio
Anggota Delegasi / F-PKB



Bambang Haryadi, SE
Anggota Delegasi / F-PGerindra



Ramson Siagian
Anggota Delegasi / F-PGerindra



H. Wilgo Zainar
Ketua Delegasi / F-PGerindra



Delegasi mendengarkan paparan Dubes RI untuk Republik Ceko

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Republik Ceko pada tanggal 1 – 7 Juli 2019 bertujuan untuk menjalin komunikasi yang lebih intens dengan stakeholders strategis di Republik Ceko demi kepentingan nasional Indonesia, serta untuk mendapatkan masukan dan pandangan bagi perumusan kebijakan luar negeri Indonesia. Poin-poin hasil kunjungan antara lain membahas:

1. Hubungan Bilateral

Dalam hubungan diplomatik, Indonesia dengan Republik Ceko terus mengalami kemajuan bahkan dewasa ini hubungannya semakin erat. Kondisi ini dihasilkan atas peran KBRI Ceko yang selalu melakukan koordinasi dan melibatkan pemerintah Ceko dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh KBRI, baik dalam kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI ataupun dalam bentuk pameran produk-produk Indonesia yang diadakan di Republik Ceko.

2. Bidang Ekonomi

Republik Ceko merupakan mitra dagang Indonesia terbesar keempat di kawasan Eropa Tengah dan Timur setelah Rusia, Ukraina dan Polandia. Selama 2010-2015, total nilai investasi Republik Ceko di Indonesia mencapai USD 34,35 juta. Volume perdagangan Indonesia juga mengalami peningkatan dan surplus dari 19% pada tahun 2015 meningkat menjadi 23% pada 2017. Produk-produk dagang Indonesia yang mengalami surplus antara lain tekstil, rotan dan sawit.

3. Bidang sosial dan budaya

Berkat promosi yang terus menerus dilakukan oleh KBRI dan elemen masyarakat Indonesia lainnya di Republik Ceko, saat ini kesenian Indonesia seperti ragam tarian daerah, alat musik tradisional dan masakan khas nusantara mulai dikenal oleh warga Ceko secara luas dan mulai digemari.

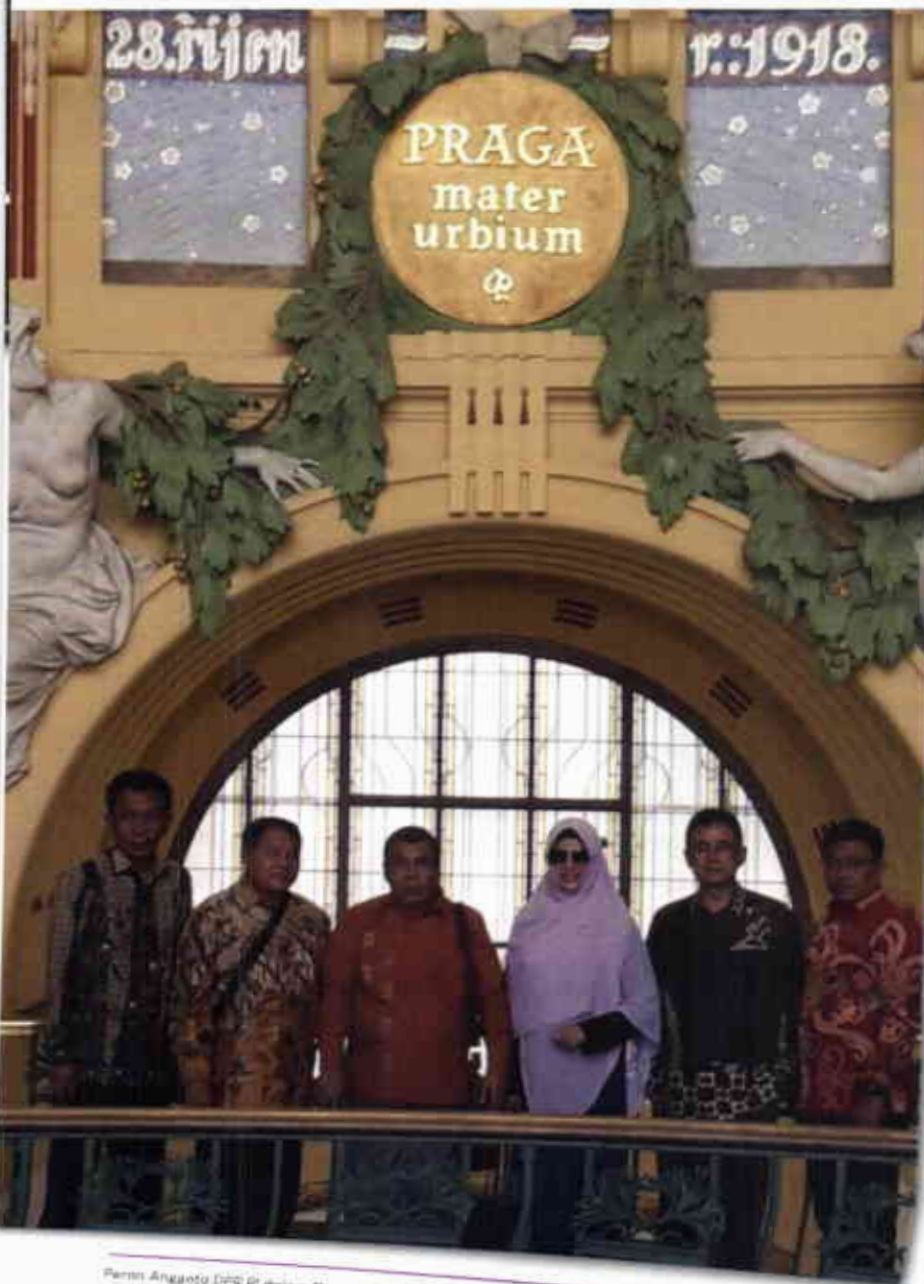
4. Bidang Infrastruktur

Republik Ceko mempunyai sarana transportasi massal kereta yaitu Metro Praha, sebuah sistem transportasi tercepat di dalam kota dan digunakan oleh sekitar satu setengah juta penumpang setiap hari, membuatnya menjadi sistem metro tersibuk ketujuh di Eropa. Semua transportasi umum di Praha memiliki sistem tiket umum terintegrasi yang dapat dipakai semua model transportasi umum



REKOMENDASI

- Ceko selama ini merupakan negara net importer untuk sebagian besar produk perikanan, sehingga Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan nilai ekspor untuk komoditas ikan olahan misalnya ikan tuna dalam olahan, komoditas fillet (misalnya Tuna Loin), komoditas ikan beku, dan komoditas ikan segar. Namun demikian peluang besar tersebut perlu diikuti negosiasi pemerintah agar berbagai hambatan tariff dan non tariff perdagangan ikan ke wilayah Uni Eropa, khususnya Republik Ceko dapat diatasi dengan baik.
- Perbaiki infrastruktur konektivitas khususnya pengelolaan dan pembangunan sistem transportasi publik yang terintegrasi di Republik Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat dalam bekerja dan berusaha. Selain untuk pemerataan distribusi barang/jasa, pembangunan ini juga akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing.



Delegasi mengunjungi stasiun kereta api terbesar di Kota Praha, yaitu Stasiun Hlavni Nadrazi



KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE AMERIKA SERIKAT TANGGAL 1 - 7 JULI 2019

SUSUNAN DELEGASI



Bara Hasibuan
Ketua Delegasi / F-PDIP

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI Bara Hasibuan ke Amerika Serikat pada tanggal 1 – 7 Juli 2019 ini memiliki sejumlah misi utama, di antaranya meningkatkan dan memaksimalkan kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat, serta bertukar pandangan dan informasi tentang pelayanan publik, perlindungan WNI, dan kerja sama pendidikan. Poin-poin hasil kunjungan antara lain membahas:

1. Peran Indonesia di PBB
Kunjungan Delegasi ke Markas Besar PBB di New York yang didampingi oleh Ambassador/Deputy Permanent Representative for Security Council membahas kiprah Indonesia sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB (masa tugas 1 Januari 2019 - 31 Desember 2020). Empat isu Prioritas dan satu isu Perhatian Khusus yang menjadi perhatian adalah:
 - Melanjutkan kontribusi Pemerintah RI dalam upayanya mewujudkan perdamaian dunia, antara lain melalui memperkuat ekosistem/geopolitik perdamaian dan stabilitas global dengan mengedepankan dialog dan penyelesaian konflik secara damai.
 - Membangun sinergi antara organisasi-organisasi regional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.
 - Meningkatkan kerjasama antara negara-negara dan DK PBB untuk memerangi terorisme, ekstremisme dan radikalisme.
 - Mensinergikan upaya penciptaan perdamaian dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan

Keanggotaan tidak tetap Indonesia pada DK PBB membawa manfaat nyata bagi rakyat, baik dari sisi politis maupun ekonomi. Dalam hal ini, sejumlah manfaat strategis keanggotaan DK Indonesia antara lain:

- Bentuk perwujudan mandat konstitusional UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- Meningkatkan peran kepemimpinan internasional Indonesia.
- Meningkatkan peranan dan kontribusi Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian (MPP)



Delegasi melakukan kunjungan ke Markas Besar PBB di New York dan melakukan Diskusi dengan Perwakilan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat

Indonesia.

- Memperbesar peluang untuk mendorong reformasi DK PBB, utamanya working method.
2. Perlindungan WNI
Masalah imigrasi menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh perwakilan Indonesia di AS maupun yang tersebar di seluruh dunia. Di seluruh Amerika Serikat, WNI yang terdaftar sekitar 145 ribu orang, sedangkan yang tidak terdaftar diperkirakan lebih banyak. Sementara saat ini ada fenomena yang cukup mengkuatirkan yaitu banyak WNI yang dokumennya tak lengkap dan berpotensi untuk dideportasi. Perlindungan WNI tetap menjadi prioritas utama semua perwakilan Indonesia di luar negeri untuk memastikan pemenuhan seluruh hak-hak WNI, tanpa melihat status keimigrasianya.
 3. Pertemuan dengan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat di New York dan New Jersey
Membahas berbagai hal terkait perkembangan politik Indonesia pasca Pemilu dan kiprah para Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat dan komitmen mereka untuk kembali ke tanah air. Mereka juga memberikan berbagai masukan terhadap pemerintah Indonesia agar terus melakukan upaya – upaya kerjasama bidang pendidikan dengan negara maju seperti Amerika Serikat.

REKOMENDASI

- Perlunya upaya lebih keras lagi untuk meningkatkan peran Indonesia dalam meningkatkan kapasitas Indonesia dalam pengambilan keputusan internasional untuk berbagai isu perdamaian dan keamanan dunia.
- Diperlukan usaha bersama secara sistematis dan komprehensif antara KJRI New York, DPR RI, dan lintas Kementerian untuk bekerjasama dalam hal peningkatan kerjasama ekonomi, budaya dan pendidikan.



KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE SELANDIA BARU TANGGAL 5 - 11 JULI 2019

SUSUNAN DELEGASI



KH. Diafar Shodiq, MA
Ketua Delegasi / F-NASDEM



Drs. Musthafa Bakri
Anggota Delegasi / F-PG

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI ke Selandia Baru tanggal 5 – 11 Juli 2019 bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara Indonesia dan Selandia Baru. Dalam pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya, disampaikan agar kedua negara saling mendorong kemajuan pariwisata, ekonomi, dan pertahanan serta saling membantu dalam peningkatan sumber daya manusia. Poin-poin yang dibahas antara lain:

1. **Transparansi Pajak**

Di Selandia Baru pajak sangat tinggi namun pengelolaannya sangat transparan, akuntabel dan manfaatnya sepenuhnya dapat dirasakan bagi masyarakat. Pajak yang telah dibayarkan akan dinikmati masyarakat melalui fasilitas kesehatan, layanan publik, dan masa pensiun. Negara menanggung masa pensiun orang yang telah bekerja dengan membayar pajak bersama serta keluarga mereka.

2. **Infrastruktur**

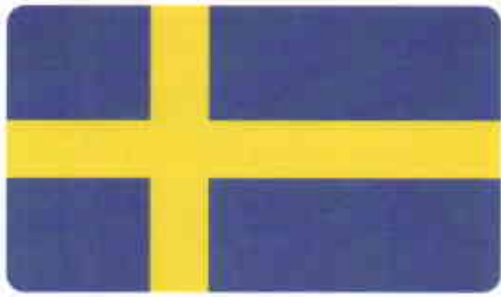
Delegasi mendapatkan gambaran mengenai keteraturan kota-kota di Selandia Baru yang mempunyai kemudahan akses dan ramah bagi pejalan kaki dan pengendara sepeda. Juga ramah atas lingkungan dengan pelarangan penggunaan kantong plastik. Selain itu, saluran pembuangan air limbah juga sudah dibuat dengan sistem pengelolaan yang terstandar dan air yang dialirkan melalui pipa-pipa ke seluruh wilayah Selandia Baru dapat diminum tanpa dimasak. Sampah kota juga dikelola dengan baik menjadikan kota-kota bersih dan tidak ada sampah berserakan. Masyarakat Selandia Baru sangat disiplin dalam menerapkan menjadi keteraturan hidup, sehingga mereka menikmati hidup yang berbahagia tanpa ada tekanan tetapi menjalankan aturan dan kedisiplinan yang sangat tinggi.



Delegasi berdiskusi dengan Dubes Indonesia untuk Selandia Baru

REKOMENDASI

- Indonesia harus menjadikan pajak sebagai investasi bagi seluruh rakyat Indonesia dan dibuktikan pada masa pensiun dimana negara membiayai hidup masyarakatnya.
- Indonesia harus segera melakukan sebuah langkah strategis dalam menata kota yang ramah lingkungan, pejalan kaki, dan pengendara sepeda.
- Pemakaian kantong plastik atau barang yang tidak ramah lingkungan harus dihentikan untuk melindungi lingkungan.
- Pengelolaan air bersih harus menjadi perhatian serius karena air adalah kebutuhan primer mendasar dan dikelola satu pintu oleh negara yang berstandar dan kualitas yang terbaik.
- Indonesia wajib mempertahankan nilai budaya agama, dan adat istiadat sebagai landasan hidup bermasyarakat.
- Indonesia wajib menegakkan aturan dan menjatuhkan sanksi kepada siapapun yang melakukan pelanggaran tanpa melihat latar belakangnya.



**KUNJUNGAN KERJA
PERORANGAN ANGGOTA
DPR RI KE SWEDIA
TANGGAL 17 - 23 JULI 2019**

SUSUNAN DELEGASI



Teuku Riefky Harsya, ST., MT
Ketua Delegasi / F-PD



Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc
Anggota Delegasi / F-PD



Didik Mukrianto, SH., MH
Anggota Delegasi / F-PD



Anton Sukartono Suratto
Anggota Delegasi / F-PD



Rinto Subekti, SE., MM
Anggota Delegasi / F-PD



Agung Budi Santoso, SH., MM
Anggota Delegasi / F-PD



Wahyu Sanjaya, SE
Anggota Delegasi / F-PD



Muslim, SHI., MM
Anggota Delegasi / F-PD



HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI ke Swedia pada tanggal 17 – 23 Juli 2019 ini bertujuan untuk menjajaki kemungkinan kerja sama antara Indonesia dan Swedia di berbagai sektor baik itu ekonomi maupun sosial dan budaya. Poin-poin hasil kunjungan antara lain :

1. Ekonomi

Dengan hubungan bilateral yang semakin baik dengan Swedia, terdapat peningkatan investasi Swedia ke Indonesia dari tahun ke tahun, terutama sejak kunjungan pimpinan Kerajaan Swedia, Carl XVI Gustaf ke Indonesia pada tahun 2017.

2. Pariwisata

Selain investasi yang terus meningkat, kunjungan turis Swedia ke Indonesia juga mengalami peningkatan meskipun belum relatif besar. Untuk itu promosi pariwisata giat dilakukan oleh KBRI terhadap keunggulan dan potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Selain pariwisata, juga diadakan promosi perdagangan dan kebudayaan dengan menggelar Kampung Indonesia di Kungstradgarden.

Dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata, Delegasi juga mengadakan pertemuan dengan Jan Lundin, Chief Executive Officer (CEO) Swedish Tourism Innovation Center, yang bertujuan untuk menambah referensi strategi promosi yang kiranya dapat dilakukan Indonesia guna meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata di Indonesia. Dalam paparannya, Jan Lundin menyampaikan beberapa proyek yang tengah dikerjakan oleh badan pariwisata yang dipimpinnya serta kerjasama yang dilakukan baik dengan lembaga pemerintah maupun swasta baik didalam maupun di luar negeri yang tujuannya untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata Swedia dari segi teknologi, branding produk, pelatihan, informasi dan manajemen wisata.

Pertemuan Delegasi DPR RI dengan pihak KBRI Swedia





Pertemuan Delegasi DPR RI dengan Swedish Tourism Innovation Center

REKOMENDASI

Swedia memiliki keunggulan diantaranya negara dengan tingkat kualitas hidup terbaik kedua pada 2018, posisi ketiga dalam Corruption Index tahun 2018, posisi ketiga dalam Innovation Scoreboard tahun 2018, negara yang memimpin dalam pengembangan renewable energy dan negara yang berhasil dalam menerapkan sistem jaminan sosial dan sistem perawatan kesehatan. Dari pengalaman Swedia tersebut, Indonesia diharapkan dapat membangun kerjasama di bidang yang menjadi unggulan untuk bisa diterapkan di Indonesia.



Peran Anggota DPR RI
dalam Penguatan Diplomasi Parlemen
pada tahun 2019





Peran Anggota DPR RI
dalam Penguatan Diplomasi Parlemen
pada tahun 2019





Delegasi DPR RI berdiskusi dengan Minister Counsellor Indonesia

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI ke Swiss pada tanggal 18 – 24 Juli 2019 ini bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dengan Swiss yang berjalan harmonis sejak tahun 1952 silam. Diharapkan hubungan bilateral kedua negara di bidang ekonomi dan investasi, hukum, pendidikan, dan pariwisata dapat berjalan lebih baik lagi. Poin-poin yang dibahas dalam kunjungan tersebut :

1. Investasi

Kerjasama antara Indonesia dan Swiss sudah berjalan dengan baik, namun perlu dilakukan optimalisasi dalam kerjasama di berbagai bidang, serta perlunya diciptakan peluang untuk membentuk kerjasama yang baru. Harus terus diupayakan agar Indonesia dapat terus menjadi mitra utama Swiss di kawasan Asia. Pertemuan membahas rencana kerja sama antara Pemda DI Yogyakarta dengan dua investor asal Swiss yang tertarik mengelola sampah menjadi listrik, namun sampai saat ini masih terkendala dan belum terealisasi. Masalah sampah di DI Yogyakarta saat ini menjadi permasalahan serius, karena air limbah sampah masuk pemukiman warga yang tinggal di sekitar pembuangan akhir sampah sehingga apabila tidak segera ditangani akan menimbulkan persoalan baru. Oleh karena itu Delegasi meminta kepada Kedutaan Besar RI di Swiss untuk bisa menjembati untuk merealisasikan kerjasama pengelolaan sampah ini. Hal lain adalah tentang Memorandum of Understanding (MoU) antara Departemen Federal Bidang Ekonomi, Pendidikan, dan Penelitian Konfederasi Swiss dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, serta peluang kerja sama di bidang lainnya.

2. Negara Swiss tidak pernah berhenti berinovasi dan berhasil menciptakan charger mobil listrik tercepat di dunia. Delegasi juga berkesempatan mengunjungi sebuah tempat pemberhentian yang menyediakan layanan isi ulang baterai mobil listrik di Zurich. Mobil listrik menjadi tren baru baru didunia karena lebih ramah lingkungan.

REKOMENDASI

Hubungan bilateral Indonesia - Swiss yang berjalan dengan baik harus terus dijaga, dirawat dan dilestarikan supaya lebih memberikan manfaat bagi kedua negara dalam konteks politik global. Terutama hubungan dan konteks kerjasama di sektor ekonomi dan perdagangan, ekspor - impor, investasi, dan kerja sama dalam bidang teknologi.



KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE PAPUA NUGINI TANGGAL 21 - 27 JULI 2019

SUSUNAN DELEGASI



drh. Jhoni Allen Marbun, MM
Ketua Delegasi / F-PD



Hartanto Edhie Wibowo
Anggota Delegasi / F-PD

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Papua Nugini tanggal 21 – 27 Juli 2019 dilaksanakan dalam upaya membangun kerja sama bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini baik di bidang infrastruktur, transportasi, maupun ekonomi. Poin-poin hasil kunjungan sebagai berikut:

1. Masalah Perbatasan
Indonesia dan Papua Nugini sudah tak memiliki masalah atau persengketaan dalam hal perbatasan negara. Kedua negara sangat menghargai integritas teritorial masing-masing. Papua Nugini senantiasa konsisten untuk mempertahankan integritas wilayah Indonesia. Walau mengizinkan elemen kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) tinggal di Papua Nugini sebagai permissive resident, namun tak pernah mengizinkan mereka melancarkan kegiatan politik, apalagi bersenjata untuk agenda separatis mereka.
2. Bidang Ekonomi
 - Neraca perdagangan Indonesia-Papua Nugini mengalami peningkatan yang positif setiap tahunnya. Peluang usaha di Papua Nugini masih terbuka lebar mengingat barang yang sama dan kualitas yang sama harganya jauh lebih mahal. Sehingga bila dikirim dari Indonesia, khususnya Jayapura di wilayah utara atau Merauke di wilayah selatan, harganya akan lebih murah. Ini merupakan kesempatan yang sangat bagus bagi para pengusaha untuk menangkap peluang produk Indonesia lebih banyak diperjualbelikan di Papua Nugini.
 - Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini baik di wilayah utara maupun selatan diharapkan bisa menjadi pintu masuk berbagai produk dan mampu bersaing dengan negara lain yang sudah terlebih dahulu menjadi pemasok termasuk ke negara Pasifik.
 - Program Tol Laut yang digagas oleh Presiden Jokowi membuat harga-harga barang di Papua tidak lagi mahal dan komoditi tersebut bisa diekspor ke Papua Nugini melalui Jayapura di wilayah utara maupun melalui Merauke di wilayah selatan.



- Beberapa pengusaha Migas dan Ritel dari Indonesia sudah mulai masuk dan berinvestasi di Papua Nugini.
3. Transportasi dan infrastruktur
- Jarak antara Papua dan Papua Nugini relatif pendek, namun karena tidak ada penerbangan langsung baik warga Indonesia maupun warga Papua Nugini memilih jalan darat ke Vanimo dan melanjutkan penerbangan ke wilayah lainnya di Papua Nugini atau sebaliknya ke Jayapura dan selanjutnya ke wilayah lainnya.
 - Pelabuhan peti kemas Port Moresby memang masih jauh dari standar pelabuhan peti kemas modern. Melalui kunjungan ini dapat dilihat bahwa aktivitas lalulintas barang di pelabuhan ini masih sangat minim.
 - Pengusaha Indonesia bisa melihat peluang ini dalam mengembangkan jaringan bisnis yang berkaitan dengan jasa pelabuhan baik dalam penataan pelabuhan maupun upaya meningkatkan peluang bisnis lalulintas barang.
4. Pariwisata
- Delegasi mengadakan kunjungan lapangan ke salah satu obyek pariwisata andalan di Papua Nugini yaitu Pantai Ela yang belum dikembangkan secara maksimal. Konsep tata ruang dan tata desain mempunyai potensi investasi bagi perkembangan pariwisata.

Dalam kesempatan ini, delegasi juga bertemu Gubernur Papua Lukas Enembe, yang menyampaikan bahwa manajemen perbatasan menjadi perhatian penting, untuk menjamin perpindahan penduduk dan barang, melawan kejahatan lintas negara, dan memberdayakan perekonomian masyarakat di area tersebut. Selain itu banyak komoditas seperti beras yang surplus di Papua dan sapi yang surplus di Papua Nugini bisa menjadi peluang ekonomi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.



Delegasi DPR RI berdiskusi dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon



Delegasi DPR RI meninjau kawasan Pantai di Port Moresby

REKOMENDASI

Pemerintah Indonesia segera membuka penerbangan langsung dari wilayah Indonesia ke beberapa kota di Papua Nugini, yang saat menjadi salah satu hambatan yang berarti dalam rangka membangun hubungan kerjasama diberbagai bidang antara kedua negara terutama bidang ekonomi. Dengan dibukanya akses transportasi langsung juga dapat meningkatkan peran Indonesia di kawasan Pasifik menjadi semakin baik.



Peran Anggota DPR RI
dalam Penguatan Diplomasi Parlemen
pada tahun 2019





KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN WAKIL KETUA DPR RI / KORPOLKAM KE INGGRIS TANGGAL 21 - 27 JULI 2019

SUSUNAN DELEGASI



DR. H. Fadli Zon, SS., M.Sc
Ketua Delegasi / F-Gerindra

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Inggris pada tanggal 21-27 Juli 2019 dalam rangka meningkatkan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Inggris secara umum, dan DPR RI dengan Parlemen Inggris secara khusus. Agenda penguatan kerja sama yang dilakukan mencakup kerja sama di bidang keparlemenan, diplomasi, sosial budaya, dan tata pemerintahan. Poin-poin hasil kunjungan antara lain:

1. Pertemuan dengan Anggota Parlemen Inggris

Melalui pertemuan dengan Anggota Parlemen Inggris Peter Mandelson, kedua pihak membahas kondisi politik serta peluang dan tantangan ekonomi di negara masing-masing. Sama-sama timbul perbedaan pandangan di Indonesia pasca Pemilu Presiden dan di Inggris setelah terpilihnya perdana menteri baru. Namun di tengah situasi seperti itu, terdapat peluang dan tantangan bagi Indonesia. Ekonomi Indonesia diproyeksikan dapat tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya walaupun akan ada tantangan besar yang harus dihadapi oleh presiden terpilih seperti pengangguran dan ketimpangan ekonomi.

Sama halnya dengan yang terjadi di Inggris saat ini, pertemuan ini juga membahas prospek Pemerintahan baru di Inggris dengan terpilihnya Perdana Menteri baru dan sikapnya terhadap negosiasi Brexit. Terpilihnya Boris Johnson sebagai Perdana Menteri Inggris yang baru juga mengundang kontroversi atas kebijakannya mengenai Brexit. Johnson berjanji untuk memimpin Inggris keluar dari Uni Eropa dengan atau tanpa kesepakatan pada batas waktu yang telah ia tentukan yaitu 31 Oktober 2019. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan kekacauan politik, ekonomi, dan sosial dalam negeri. Keuangan Eropa juga dapat terancam jika Brexit dilakukan tanpa kesepakatan. Menurut Mandelson, kesepakatan akhir Brexit pada akhirnya harus disetujui oleh seluruh rakyat Inggris.



2. Pertemuan dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD)

Delegasi juga mengadakan pertemuan dengan CEO Westminster Foundation for Democracy (WFD), Richard Graham MP dan Anthony Smith. Dalam pertemuan itu dibahas komitmen kerja sama penguatan demokrasi Indonesia dengan DPR periode 2019-2024 di sejumlah bidang seperti implementasi legislasi, transparansi parlemen, dan peningkatan kapasitas staf. Lebih lanjut pertemuan membahas rencana kunjungan Kaukus Indonesia di Parlemen Inggris (APPGI) ke Jakarta dan pentingnya meningkatkan hubungan antar kedua parlemen sebagai sarana mendukung penguatan hubungan bilateral kedua negara.

3. Pertemuan dengan Dubes RI untuk Kerajaan Inggris Merangkap Irlandia dan International Maritime Organization (IMO)

Pertemuan dengan Dubes RI, Dr. Rizal Sukma, membahas mengenai upaya peningkatan hubungan Indonesia - Inggris, terutama pasca-Brexit. Kedua negara sebenarnya telah menjalin kerja sama di hampir semua aspek kehidupan mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Hengkangnya Inggris dari Uni Eropa tidak akan mengganggu hubungan kerja sama Indonesia dengan Inggris. Beberapa bidang yang dapat menjadi fokus prioritas termasuk riset dan pendidikan, serta kerja sama pada penyelesaian isu-isu global serta kawasan. Kerja sama ekonomi khususnya dalam hal perdagangan dan investasi juga terus meningkat dan berjalan dengan baik. Indonesia dan Inggris sepakat untuk memperkuat kerja sama ekonomi



*Pertemuan dengan
Anggota Parlemen
Inggris, Peter
Mandelson*



Pertemuan dengan CEO WFD, Richard Graham, MP dan Anthony Smith

melalui interaksi bisnis dan perluasan akses antara kedua negara. Indonesia diharapkan dapat semakin terbuka dan mempermudah investasi asing, khususnya Inggris untuk masuk sehingga Indonesia tidak kalah saing dengan negara-negara di Asia Tenggara yang lain. Brexit dapat menjadi peluang Inggris untuk melihat peluang-peluang baru di luar Uni Eropa dan dengan ekonomi berkembang, termasuk Indonesia.

Dalam bidang pendidikan, Inggris telah menjadi salah satu destinasi favorit pelajar Indonesia untuk menuntut ilmu sehingga pemerintah melakukan kerjasama seperti salah satunya melalui skema LPDP yang menerima lebih banyak lagi pelajar dari Indonesia. Saat ini Indonesia sedang gencar dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga Inggris diharapkan dapat menjadi mitra Indonesia dalam mendukung upaya untuk memproduksi SDM yang berkualitas dan unggul sehingga mampu bersaing di tingkat internasional. Diharapkan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Inggris ini dapat meningkatkan sistem kualitas pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Kedua belah pihak juga senantiasa melakukan diskusi dan bertukar pendapat serta pandangan mengenai perkembangan isu-isu regional dan global yang menjadi perhatian bersama. Disinggung juga mengenai pentingnya penguatan hubungan antar-parlemen. Kedua negara sepakat dalam isu pemeliharaan perdamaian, pencegahan dan penindakan terhadap terorisme, penyelesaian konflik, serta penguatan penegakan hukum internasional.

REKOMENDASI

Hal yang akan segera ditindak lanjuti adalah agenda pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral Antara Parlemen Indonesia dan Inggris.



Peran Anggota DPR RI
dalam Penguatan Diplomasi Parlemen
pada tahun 2019





KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE PAPUA NUGINI TANGGAL 9 - 15 AGUSTUS 2019

SUSUNAN DELEGASI



DR. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si
Ketua Delegasi / F-PD

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan kerja perorangan yang dilaksanakan oleh Anggota DPR RI ke Papua Nugini pada tanggal 9 – 15 Agustus 2019 ini bertujuan antara lain untuk melakukan studi banding terhadap praktik ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Papua Nugini. Agenda dan poin-poin hasil-hasil pertemuan antara lain:

1. Pertemuan dengan Kamar Dagang Papua Nugini
Guna memperoleh informasi dan perbandingan praktik penerapannya, delegasi bertemu dengan Ketua Kamar Dagang Papua Nugini untuk membicarakan masalah perdagangan dengan Indonesia. Papua Nugini telah melakukan kerjasama di dengan Kadin Papua untuk untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Papua Nugini. Namun terkendala dengan akses ekspor barang dari Papua ke PNG disebabkan hanya lewat darat. Sementara apabila ekspor komoditi dalam skala besar harus melalui laut agar bisa menjangkau daerah-daerah terpencil di PNG. Potensi ekspor ini menjadi peluang yang bagi Indonesia karena barang-barang dari Indonesia kualitasnya lebih bagus dan murah dibandingkan dari Australia.
2. Pertemuan dengan Menteri Jhon Smith
Membahas masalah hubungan bilateral kedua negara mengingat Kawasan Pasifik sangat berpotensi untuk membuka peluang di bidang ekonomi. Selain itu dibahas pula masalah perpajakan di Papua Nugini.
3. Pertemuan dengan pengusaha asal Indonesia di Papua Nugini
Dalam pertemuan itu dibahas mengenai kendala impor unggas dari Indonesia. Standar impor pangan yang berlaku di Papua Nugini sesuai dengan standar biosekuriti di Selandia Baru. Beberapa negara belum dapat menerima daging ayam segar dingin dan beku karena Indonesia belum bebas penyakit AI (Avian Influenza). Karenanya, untuk mendapatkan persetujuan dari negara



calon pengimpor, maka ayam hidup harus berasal dari peternakan ayam yang telah mendapatkan sertifikat kompartemen bebas penyakit AI dari Kementerian Pertanian melalui Direktorat Kesehatan Hewan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain itu juga harus mendapatkan dukungan jaminan keamanan pangan berupa Sertifikat Veteriner dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan.



*(kanan) Pertemuan dengan Ketua Kamar Dagang Papua Nugini untuk membicarakan masalah perdagangan dengan Indonesia dan
(kiri) pertemuan dengan Menteri Jhon Smith*

REKOMENDASI

Dari kunjungan ini, delegasi mendapatkan informasi mengenai bagaimana mengatur, mengelola serta melakukan kebijakan terkait dengan Pajak sehingga hal itu menjadi masukan penting bagi Anggota Komisi XI DPR RI dalam proses pembahasan optimalisasi potensi penerimaan negara dengan pemerintah.



KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE INGGRIS TANGGAL 11 - 17 AGUSTUS 2019

SUSUNAN DELEGASI



DR. Erislan, ST., MM
Ketua Delegasi / F-Hanura

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan kerja perorangan Anggota DPR Inggris pada tanggal 11 – 17 Agustus 2019 ke Inggris bertujuan untuk meningkatkan kerja sama serta dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara, serta untuk mendapatkan gambaran mengenai desain/konsep dan sistem dalam menstabilkan bidang perekonomian, bidang politik dan Badan Usaha Milik Negara. Dalam kunjungan ini, delegasi bertemu dengan Dubes RI untuk Inggris, Rizal Sukma, Kunjungan ke Hyde Parka dan Oxford University. Poin-poin hasil kunjungan antara lain:

1. Bidang Ekonomi

Situasi terbaru di Inggris dengan proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau yang dikenal dengan Brexit. Dua alasan utama Brexit adalah bahwa Inggris ingin menghentikan arus imigran yang masuk ke Inggris, dan bahwa Inggris ingin keluar dari aturan UE tentang agrikultur dan perdagangan.

Proses keluarnya Inggris dari UE akan membawa ketidakpastian bagi perekonomian global, tidak terkecuali kepada Indonesia. Namun begitu, hal tersebut dapat menjadi peluang masuknya capital flow ke Indonesia serta peluang akses pasar bagi lebih banyak produk Indonesia ke Inggris.

Selain Brexit, ada tantangan pengembangan ekspor ke Inggris bagi Indonesia, antara lain munculnya kampanye negatif di antara konsumen Inggris untuk produk minyak kelapa sawit asal Indonesia oleh supermarket "Iceland" yang dipublikasikan oleh berbagai media seperti Independent, Telegraph, Guardian dan BBC. Media massa Inggris mengutip bahwa Iceland merupakan supermarket pertama yang melarang minyak kelapa sawit dalam penjualannya. Selain itu Iceland menayangkan video iklan anak-anak dan menyusun petisi untuk tidak mengkonsumsi palm oil. Iklan Iceland menghubungkan antara pengadaan perkebunan kelapa sawit dengan deforestasi yang terjadi.



*Pertemuan dengan Duta
Besar RI untuk Inggris,
Rizal Sukma*

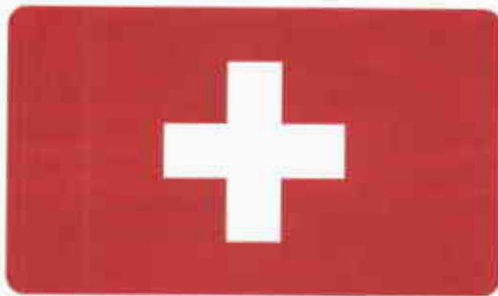
Menanggapi hal tersebut, KBRI telah melakukan komunikasi dengan pihak Iceland dan menjelaskan kepada mereka kebijakan yang dilakukan Indonesia untuk mengatasi deforestasi dan moratorium lahan untuk sawit. Secara umum, total perdagangan Indonesia dengan Inggris mencapai USD 2.4 milyar pada tahun 2017. Surplus neraca perdagangan Indonesia dengan Inggris mencapai USD 356 Juta pada 2017 dan USD 212 Juta pada Januari-September 2018.

2. Kunjungan ke Cambridge University dan Oxford University

Inggris merupakan salah satu negara di Eropa yang banyak dikunjungi oleh masyarakat Indonesia. Dari total sekitar 10.000 WNI yang berada di Inggris, 2.000 WNI merupakan pelajar/mahasiswa yang melanjutkan studi di Inggris. Cambridge University dan Oxford University yang menjadi Universitas impian bagi para mahasiswa di dunia. Selain itu, Inggris juga memiliki banyak Universitas lainnya yang memiliki masing-masing keunggulan di berbagai bidang ilmu pengetahuan.

REKOMENDASI

Kedepannya Inggris diperkirakan akan lebih agresif untuk melakukan percepatan FTA (Free Trade Agreement) bilateral dengan Negara-negara Non-UE dalam rangka mengantisipasi penurunan perdagangan. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk memulai proses FTA bilateral dengan Inggris, selain menyelesaikan (Comprehensive Economic Partnership Agreement) CEPA dengan UE. Sebagai informasi, Indonesia belum memiliki free trade agreement dengan Uni Eropa sebagaimana negara Vietnam dan negara-negara anggota Commonwealth. Vietnam menikmati tarif yang jauh lebih murah daripada Indonesia di pasar Inggris karena mendapatkan preferensi dalam kerjasama EU-Vietnam Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation (PCA) sejak 2012.



KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE SWISS TANGGAL 18 - 24 AGUSTUS 2019

SUSUNAN DELEGASI



Robert Jopy Kardinal, S.AB
Ketua Delegasi / F-PG



Edison Betaubun
Anggota Delegasi / F-PG



H. Agus Makmur Santoso, S.Kom
Anggota Delegasi / F-PG



H. Alamuddin Dimiyati Rois
Anggota Delegasi / F-PKB



Dra. Siti Sarwindah
Anggota Delegasi / F-PDIP

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan kerja perorangan yang dilaksanakan oleh Anggota DPR RI ke Swiss pada tanggal 18 – 24 Agustus 2019 sebagai bagian dari amanah konstitusi untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Delegasi diterima oleh Duta Besar untuk Swiss dengan poin-poin hasil pertemuan sebagai berikut:



Bidang Ekonomi dan Keuangan

Diharapkan agar kerjasama kedua negara semakin erat dan Indonesia dapat menjadi mitra terdepan bagi Swiss karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, terutama di bidang kelautan dan perikanan. Selain itu Indonesia dan Swiss telah terbangun kerjasama di bidang keuangan melalui kerangka Automatic Exchange of Information (AEOI), disepakati bahwa pertukaran data keuangan secara otomatis antara Indonesia dan Swiss mulai dilakukan pada bulan September 2019. Ini menjadi momentum yang sangat baik antara kedua negara karena, dengan AEOI, artinya tidak ada data keuangan yang tidak diketahui Indonesia.

Selain itu, di Indonesia saat ini industri Financial Technology (Fintech) mulai berkembang. Fintech di Swiss dikenal sebagai salah satu pusat industri jasa dan inovasi keuangan dunia. Ini juga sangat menarik karena Indonesia saat ini sedang dalam masa di mana banyaknya tumbuh Industri Fintech. Hal ini menjadi peluang kerjasama terutama dalam memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan.

REKOMENDASI

Hubungan bilateral Indonesia - Swiss yang berjalan dengan baik harus terus dijaga, dirawat dan dilestarikan supaya lebih memberikan manfaat bagi kedua negara dalam konteks politik global. Terutama hubungan dan konteks kerja sama di sektor ekonomi dan perdagangan, ekspor - impor, investasi, dan kerja sama dalam bidang teknologi.



*Pertemuan dengan Duta
Besar RI untuk Konfederasi
Swiss*



KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE KROASIA TANGGAL 18 - 24 AGUSTUS 2019

SUSUNAN DELEGASI



Mindo Sianipar
Ketua Delegasi / F-PDIP



Aria Bima
Anggota Delegasi / F-PDIP



Marianus Gea
Anggota Delegasi / F-PDIP



Yadi Srimulyadi
Anggota Delegasi / F-PDIP



Muhammad Rakyan Ihsan Yunus
Anggota Delegasi / F-PDIP



I Gusti Agung Putri Astrid Kartika
Anggota Delegasi / F-PDIP

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI ke Kroasia pada tanggal 18 – 24 Agustus 2019 bertujuan antara lain untuk menjalin komunikasi dengan stakeholders strategis di Republik Kroasia untuk kepentingan nasional Indonesia, serta untuk mendapatkan masukan dan pandangan bagi perumusan kebijakan luar negeri Indonesia dalam kaitannya hubungan diplomasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Republik Kroasia. Delegasi mengadakan pertemuan dengan Dubes RI untuk Kroasia dan jajarannya dengan poin-poin hasil pertemuan antara lain:



Pertemuan Delegasi DPR RI dengan KBRI Kroasia



1. Hubungan Bilateral
DPR RI telah beberapa kali mengadakan kunjungan kerja ke Kroasia, tetapi kunjungan balasan ke Indonesia belum dilaksanakan oleh Parlemen Kroasia, dan ini menandakan adanya sesuatu yang hilang dalam perspektif pemerintah Kroasia, sehingga belum menganggap adanya urgensi untuk melakukan kunjungan balasan.
2. Bidang Ekonomi
Letak negara Kroasia yang sangat strategis dan bisa menjadi hub ekonomi ke banyak negara di Eropa, seperti ke Italia, Prancis, Bosnia, Serbia, Rusia dan banyak negara lainnya, dapat dimanfaatkan sebagai pintu masuk ekspor – impor produk-produk Indonesia ke pasar Eropa. Posisi ini juga dapat digunakan untuk kepentingan lain, seperti promosi pariwisata Indonesia. Pada tahun 2018 saja, ada kurang lebih 20 juta wisman asal Indonesia yang berkunjung ke Kroasia, yang sangat kontras dengan jumlah wisman Kroasia ke Indonesia yang hanya berjumlah sekitar empat juta orang saja.
3. Sektor Pariwisata
Terkait dengan sektor pariwisata, Indonesia juga dapat belajar dari Kroasia tentang pemberlakuan City Tax atau semacam pajak yang dikenakan kepada turis yang datang dan menginap di Kroasia sebesar 10 HRK (sekitar Rp.20.000,-/hari), meskipun secara jumlah terbilang kecil, tetapi dengan jutaan wisman yang berkunjung ke Kroasia setiap tahunnya, pajak ini tentunya dapat menjadi pendapatan negara yang cukup signifikan.
4. Sektor Transportasi
Transportasi publik menjadi penghubung ke banyak titik di wilayah Zagreb sebagai Ibu Kota Kroasia. Dengan transportasi publik utama adalah Trem, cukup mereduksi penggunaan kendaraan pribadi sehingga dapat mengurangi kemacetan di jam-jam sibuk. Bahkan ada beberapa wilayah yang melarang masuknya kendaraan bermotor di siang hari kecuali Ambulance, Mobil Polisi dan kendaraan pengangkut logistik.

REKOMENDASI

- Hubungan bilateral Indonesia-Kroasia khususnya dalam konteks kerjasama di sektor ekonomi dan perdagangan, ekspor dan impor, investasi dan penanaman modal, bidang teknologi dan alat-alat militer perlu ditingkatkan.
- Kerjasama yang sudah dirintis oleh KBRI Kroasia yang perlu untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia, antara lain kerjasama penggunaan Port Hafen Rijeka untuk pintu masuk produk-produk Indonesia ke Kroasia, karena selama ini produk-produk Indonesia yang masuk ke Kroasia masuk dari negara ketiga.
- Peluang Indonesia sangat tinggi untuk mengirim produk-produk unggulan ke Kroasia mengingat produk-produk China belum massive masuk ke Kroasia.



KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN WAKIL KETUA DPR RI / KORKESRA KE PAPUA NUGINI TANGGAL 18 - 24 AGUSTUS 2019

SUSUNAN DELEGASI



Fahri Hamzah, SE
Ketua Delegasi / F-PKS

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI ke Papua Nugini pada tanggal 18 – 24 Agustus 2019 dilaksanakan dengan pertimbangan selama ini diplomasi Indonesia selama ini masih berfokus ke wilayah Barat, padahal tujuh dari provinsi di Indonesia saja justru masuk ke wilayah Pasifik. Oleh karena itu, kerja sama dengan negara di kawasan Pasifik tentunya lebih strategis bagi Indonesia untuk mengambil alih kepemimpinan di kawasan ini. Agenda dan poin-poin hasil pertemuan antara lain:

1. Pertemuan dengan Wakil Ketua Parlemen

Meskipun negara negara Pasifik adalah negara negara kecil namun keberadaannya selama ini sangat besar memainkan peran untuk mempropagandakan berbagai isu yang bisa membahayakan bagi Indonesia. Terkait isu Papua Barat semisal, negara negara Pasifik telah menjadi lahan yang subur bagi distorsi berbagai isu pertahanan keamanan di Papua Barat. Untuk itu salah satu agenda dalam pertemuan tersebut selain untuk meningkatkan hubungna bilateral kedua negara, juga untuk memepererat komunikasi antar parlemen antar kedua negara. Upaya ini sangat penting dilakukan untuk mencairkan berbagai ketegangan dan isu yang sedang berkembang di Pasifik sehingga memberikan pandangan yang positif tentang Indonesia bagi negara-negara Pasifik.

2. Pertemuan dengan KBRI

Pertemuan di KBRI diisi dengan diskusi dan tanya jawab mengenai perkembangan terbaru kondisi di Indonesia dan Papua Nugini. Beberapa hal disampaikan oleh perwakilan dari KBRI terkait isu-isu yang berkembang baik politik, ekonomi, sosial, permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh KBRI dan WNI selama tinggal di Papua Nugini.



Pertemuan dengan Wakil Ketua Parlemen Papua Nugini

REKOMENDASI

Perlu dibentuk GKSB dengan negara negara Pasifik, dengan pertimbangan sudah saatnya Pasifik menjadi poros baru diplomasi Indonesia. Wilayah barat Indonesia telah sesak dengan pertarungan modal besar, sementara di Pasifik Indonesia lebih memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin kawasan.

Pertemuan dengan Wakil Ketua Parlemen Papua Nugini





KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE EKUADOR TANGGAL 18 - 24 AGUSTUS 2019

SUSUNAN DELEGASI



Hj. Nurhayati Monoarfa
Ketua Delegasi / F-PKB

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI ke Ekuador pada tanggal 18 – 24 Agustus 2019 dilaksanakan dalam upaya bertukar pandangan dalam hal tata kelola transportasi kota, memperkuat kerja sama yang selama ini sudah terjalin di bidang sumber daya alam, infrastruktur, transportasi, pemerintahan, dan kebudayaan. Agenda dan poin-poin hasil pertemuan antara lain :

1. Pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Ekuador

Hubungan diplomatik Indonesia dan Ekuador selama ini telah berjalan dengan sangat baik dengan penghargaan sebagai «Duta Besar Internasional Terbaik» yang diterima oleh Dubes RI untuk Ekuador dari Ikatan Jurnalis Ekuador. Penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas upaya diplomatik Indonesia di Ekuador dan hal ini patut diapresiasi dan bisa menjadi contoh bagi perwakilan RI lainnya di luar negeri.

Selain itu, KBRI dan masyarakat Indonesia di Ekuador senantiasa berupaya mempromosikan Indonesia, baik pariwisata maupun produk-produk Indonesia yang berpotensi meraih pasar di Ekuador. Potensi kerjasama Indonesia- Republik Ekuador masih perlu ditingkatkan, baik dalam bidang ekonomi, pertanian, perdagangan dan investasi, seni budaya dan pariwisata.

2. Peninjauan Infrastruktur dan Obyek Pariwisata

Quito dikenal sebagai ibukota budaya, dengan pusat bersejarahnya menjadi situs Warisan Budaya Dunia UNESCO sejak 1978 karena statusnya sebagai salah satu distrik pusat yang paling tidak berubah dan paling dilestarikan di benua Amerika. Situs dan bangunan tua seperti di El Panecillo en Quito, TeleferiQo, Ciudad Mitad del Mundo, Gereja dan Bangunan Tua di Quito dikelola dengan baik dan serius serta infrastruktur penunjang pariwisata.

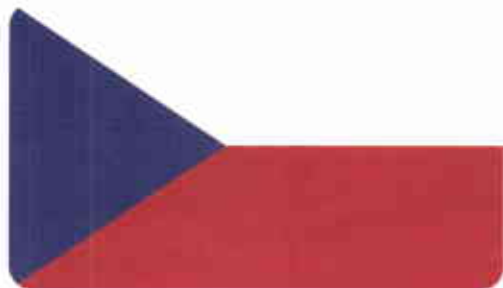


3. Masalah Imigran

Dalam beberapa tahun terakhir, telah ada gelombang nyata migran Venezuela yang telah meninggalkan negara mereka karena pergulatan internal, dan menjadi tantangan tidak hanya bagi Quito tetapi juga bagi seluruh Ekuador untuk mengelola kedatangan para imigran yang jumlahnya mencapai ratusan ribu. Ekuador telah lama menjadi penerima pengungsi terbesar di Amerika Latin, dikarenakan konflik, kekerasan dan penindasan yang terjadi di negara sekitarnya.

REKOMENDASI

- Dalam sektor pariwisata, sangatlah penting untuk memperhatikan pembangunan dan tata kelola infrastruktur yang berorientasi pada keamanan, kenyamanan, efisiensi, dan keberlanjutan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, sekaligus sebagai penunjang sektor pariwisata.
- Upaya diplomasi melalui kegiatan pameran dan promosi budaya dan pariwisata dinilai cukup berhasil meningkatkan citra Indonesia, juga membuka jalan untuk memperkuat hubungan kedua negara. Namun demikian, perlu strategi pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk mewujudkan kerjasama di sektor yang potensial maupun yang telah berjalan baik. Selain itu, Indonesia dan Ekuador juga masih perlu bekerja sama dalam penanganan masalah global seperti penanggulangan kemiskinan, terorisme, dan dampak perubahan iklim.



KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE REPUBLIK CEKO TANGGAL 19 - 25 AGUSTUS 2019

SUSUNAN DELEGASI



Didi Irawadi Syamsuddin, SH., LLM
Ketua Delegasi / F-PD



H. Lukman Hakim Hasibuan
Anggota Delegasi / F-PPP



*Diskusi Anggota DPR RI bersama dengan Dubes RI untuk
Republik Ceko dan Pejabat KBRI*

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI ke Republik Ceko pada tanggal 19 – 25 Agustus 2019 dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan hubungan politik, ekonomi, dan budaya antara Indonesia dan Republik Ceko. Melalui diskusi yang dilakukan dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia



untuk Republik Ceko, poin-poin hasil pertemuan antara lain:

- Indonesia dan Republik Ceko seringkali melakukan pertemuan konsultasi dan peninjauan kerja sama, baik yang diwakili oleh KBRI maupun melalui pertemuan bilateral antar kementerian kedua negara. Kondisi ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa depan.
- Dalam bidang perdagangan, volume ekspor – impor antara Indonesia dan Republik Ceko dapat dikatakan cukup tinggi. Produk tekstil dan pakaian, produk olahan kayu, produk kertas dan olahan karet merupakan komoditas ekspor unggulan Indonesia ke Republik Ceko. Selain itu, Republik Ceko juga sudah berencana melakukan berbagai investasi di Indonesia, khususnya dalam produksi baja dan tembaga di beberapa kawasan industri di Indonesia.

REKOMENDASI

Pemerintah Indonesia perlu menguatkan kerja sama dengan Republik Ceko terutama terkait pelayanan sosial dan kesehatan dan juga pariwisata karena Republik Ceko termasuk negara dengan pelayanan sosial dan kesehatan dan pengelolaan pariwisata yang sudah cukup baik.



KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE SELANDIA BARU TANGGAL 21 - 27 AGUSTUS 2019

SUSUNAN DELEGASI



H. Sigit Susiamtomo
Ketua Delegasi / F-PKS

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Selandia Baru, tanggal 21-27 Agustus 2019 ini bertujuan untuk mempelajari pemanfaatan teknologi di bidang pertanian dan peternakan, serta untuk melakukan peninjauan peluang kerja sama di bidang geotermal dan peternakan. Agenda dan poin-poin hasil kunjungan antara lain:

1. Pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Selandia Baru
Selandia Baru memandang Indonesia sebagai mitra strategis. Hubungan diplomatik antara negeri ini sebenarnya telah dimulai pada tahun 1958. Duta Besar berharap ada kunjungan khusus dari Indonesia terkait perusahaan geothermal, agar dilakukan pembelajaran secara komprehensif, karena keahlian keahliannya Selandia Baru pada bidang ini dapat digunakan dalam kerjasama pengembangan kekayaan sumber daya geothermal yang ada di Indonesia.
2. Pertemuan dengan Presiden New Zealand Institute of Architect (NZIA), Tim Melville
Dari pertemuan tersebut banyak hal bisa dipelajari, antara lain mengenai pelaksanaan UU Arsitek di Selandia Baru mengingat negara tersebut sudah jauh lebih lama mempunyai Architect Act. Ada dua organisasi yaitu Badan Registrasi Arsitek dan Badan Monitoring Arsitek. Badan Registrasi Arsitek berperan membuat kurikulum, menguji, membuat standar, memberi lisensi, pengembangan profesi lanjutan dan menguji kembali setelah arsitek berpraktek lima tahun. Badan Monitoring Arsitek berfungsi jika ada permasalahan antara arsitek dan klien, jika kesalahan ada pada arsitek maka lisensi akan dicabut juga. Semua dijalankan dengan payung hukum Architect Act. Mengingat Selandia Baru lebih maju dalam masalah arsitek ini, Presiden NZIA akan menyampaikan hasil pertemuan kepada anggota NZIA dan berharap ke depan ada kesempatan untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan pihak Indonesia, agar terjalin kesepakatan antara arsitek Selandia Baru dan arsitek Indonesia dan agar bisa saling bertukar informasi.



Delegasi berdiskusi dengan NZIA

3. Kunjungan ke Kementerian Transportasi

Kementerian Transportasi Selandia Baru lebih banyak terkait dengan pembangunan jalan. Pendanaan pembangunan transportasi di Selandia Baru berasal dari tiga sumber yaitu: pajak dari pembelian bahan bakar minyak, penarikan dana dari pengguna jalan dengan beban berlebih, dan biaya pendaftaran dan lisensi kendaraan bermotor. Selain itu pendanaan pembangunan transportasi juga berasal dari partisipasi pemerintah daerah (local share). Untuk produk farming yang merupakan unggulan di Selandia Baru, untuk pengiriman logistik, perusahaan sendiri yang menangani urusan transportasi bahan dan hasil produksi. Peran pemerintah adalah mengatur pada jalur kargonya.

4. Kunjungan ke Peternakan pengusaha Indonesia

Petani dan peternak di Selandia Baru menerima skema kredit di mana perbankan dapat menerima collateral seperti lahan peternakan atau sapi hingga batas waktu 15 tahun dan bunga di bawah 6,5 persen. Pemerintah pun dimungkinkan membangun infrastruktur seperti jalan hingga lahan peternakan. Listrik masuk hingga pelosok di mana pun peternakan berada. Guna memajukan usaha, peternak bersatu membentuk koperasi pengolahan susu bernama Fonterra di Edendale yang menaungi 6.789 peternakan, yang mengolah 15 juta liter susu per hari. Pabrik raksasa itu mengklaim diri sebagai «pabrik susu terbesar dan ter higienis» di dunia. Pasaran pabrik susu menjangkau seluruh dunia, terutama Asia Pasifik. Secara konservatif, Fonterra tidak listing di bursa efek karena tidak menghendaki para spekulan yang akan menghancurkan kegiatan pengolahan susu di Selandia Baru, terutama ketika harga susu sedang merosot.

REKOMENDASI

- Selandia Baru sebagai negara yang maju dalam geothermal dan pertanian (termasuk peternakan) memberikan banyak pembelajaran berharga bagi Indonesia, terutama teknologi pertanian dalam peternakan sapi perah.
- Ada peluang kerjasama Indonesia – Selandia Baru di sektor geothermal dan sektor pertanian khususnya peternakan. Untuk merealisasikannya perlu ada tindak lanjut oleh eksekutif.
- Pemerintah Daerah hendaknya menjadikan KBRI sebagai perwakilan sekaligus pemasar untuk berbagai produk dari daerah-daerah di Indonesia. Bagaimana caranya agar setiap potensi di daerah bisa dihubungkan ke Selandia Baru dan sebaliknya, tidak harus melalui pemerintah pusat.



KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE TURKI TANGGAL 21 - 26 AGUSTUS 2019

SUSUNAN DELEGASI



Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si
Ketua Delegasi / F-NASDEM

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan perorangan Anggota DPR RI ke Republik Turki pada tanggal 21 – 26 Agustus 2019 dilaksanakan dengan dua tujuan utama, yaitu mengetahui strategi kebijakan Pemerintah Turki dalam menerapkan sistem pendidikan sehingga menjadikan Turki salah satu rujukan utama melanjutkan pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam, dan mengetahui kebijakan Pemerintah Turki dalam menekan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial. Poin-poin hasil kunjungan antara lain:

1. Bidang Pendidikan

Pendidikan di Turki memiliki keunggulan karena lokasinya yang terletak di antara benua Eropa dan Asia, sehingga suasana belajarnya pun terpengaruh budaya Barat dan Timur. Selain itu, dengan sekian banyak peninggalan pemikiran, budaya, dan materi yang dimilikinya, Turki juga menawarkan khazanah pendidikan yang sangat menarik. Perpaduan bahasa pengantar Arab, Inggris, dan Turki dalam perkuliahan juga memberikan nilai tambahnya sendiri bagi para pelajar di universitas-universitas Turki.

2. Bidang Sosial

Dalam hal penanganan dan kebijakan pemerintah terkait penduduk miskin perkotaan, pemerintah Turki melalui Housing Development Administration of Turkey (TOKI) telah menyediakan perumahan yang biayanya cukup terjangkau untuk kalangan menengah ke bawah. Perumahan ini mengambil alih kawasan-kawasan kumuh perkotaan dan mengubahnya menjadi apartemen besar yang dapat menampung ribuan keluarga. Tidak hanya menyelesaikan masalah kekumuhan, kebijakan ini juga memberikan ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas oleh masyarakat di permukiman tersebut.



Pertemuan dengan pelajar dan masyarakat Indonesia yang ada di Turki

Sebagian besar penduduk Turki yang bekerja, mereka dengan otomatis terdaftar dalam program asuransi pemerintah yang bernama SGK, suatu lembaga jaminan sosial pemerintah Turki Sosial Guvenlik Kurumu. Program asuransi ini bekerjasama dengan instansi-instansi di Turki yang mana setiap pekerja di Turki diwajibkan untuk bekerja dengan asuransi kesehatan. Dengan begitu, para penduduk bisa periksa dan berobat ke dokter dengan gratis atau dengan biaya yang lebih rendah. Beberapa instansi seperti universitas-universitas, memiliki klinik universitasnya masing-masing yang mana para pelajar dan pekerja kampus bisa periksa dan berobat dengan gratis walaupun tidak memiliki asuransi SGK.

3. Bidang Perempuan dan Anak

Di Turki baru saja meluncurkan hukum yang mengatur tentang kekerasan domestik di dalam keluarga. Dalam budayanya, Turki menganggap urusan domestik keluarga merupakan hal yang tidak sepatutnya pemerintah ikut campur. Pada tahun 2012 peraturan perlindungan terhadap perempuan dan anak ini ditetapkan salah satu sebabnya karena kasus seorang perempuan Turki yang menuntut Turkey ke European Court of Human Right atas ketidak responnya Pemerintah Turki ketika suaminya melakukan kekerasan domestik dan Pemerintah tidak bisa menjadi penyedia konsultasi terhadap masalah tersebut.

Menurut World Bank, persentase anak dibawah umur lima tahun yang mengalami kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama atau biasa disebut stunting pada tahun 2013, mencapai 9,5 %. Hal yang dilakukan oleh Pemerintah Turki untuk menangani hal ini adalah memulainya sejak anak tersebut masih dalam kandungan. Pemerintah Turki secara rutin tiap bulan menyantuni dengan memberikan sejumlah uang yang cukup (sekitar 500 Turkish Lira) untuk memberi asupan bergizi bagi ibu dan bayi tersebut. Untuk makanan dan minuman bergizi di Turki sendiri, dapat diperoleh dengan mudah dengan harga yang terjangkau untuk setiap keluarga. Oleh karena itu, diharapkan kasus stunting bisa diminimalisir.



REKOMENDASI

- Diperlukan usaha bersama secara sistematis dan komprehensif antara Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Istanbul, DPR RI, dan lintas Kementerian, Ekonomi, Budaya dan Pendidikan untuk kerjasama di bidang pendidikan dalam rangka perbaikan sistem pendidikan di Indonesia.
- Perlunya upaya lebih keras lagi untuk meningkatkan peran Indonesia dalam meningkatkan kapasitas Indonesia dalam pengambilan keputusan internasional untuk berbagai isu perdamaian dan keamanan dunia.



Peran Anggota DPR RI
dalam Penguatan Diplomasi Parlemen
pada tahun 2019





KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE SELANDIA BARU TANGGAL 21 - 27 AGUSTUS 2019

SUSUNAN DELEGASI



DR. TB.H. Ace Hasan S
Ketua Delegasi / F-PG



H. Daniel Mutagien S
Anggota Delegasi / F-PG

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI ke Selandia Baru tanggal 21-27 Agustus 2019 bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai persoalan di bidang politik serta sosial, budaya yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam administrasi negara, agar bisa menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan di Indonesia. Poin-poin hasil kunjungan antara lain mengenai Jaminan Kesehatan, Pengangguran, dan Jaminan Kecacatan:

- Sistem kesehatan umum di Selandia Baru sudah berjalan bagus. Selandia Baru memberlakukan sistem jaminan sosial secara menyeluruh bagi penduduknya dengan pendanaan melalui pajak yang diatur dan dilaksanakan secara baik. Hal itu berbeda dari sistem di Amerika Serikat maupun sebagian negara Eropa yang menerapkan sistem iuran. Jaminan kesehatan juga memberikan manfaat tunai bagi orang yang sementara tidak bisa bekerja karena sakit, cacat, atau kecelakaan.
- Kemudian terdapat jaminan bagi pengangguran (unemployment benefit) bagi penduduk yang berusia di atas 18 tahun dan belum memiliki pekerjaan (kecuali bagi mahasiswa) yang secara otomatis berhenti bila sudah mendapat pekerjaan.
- Juga terdapat jaminan kecacatan (invalid's benefit) bagi penyandang cacat permanen akibat kecelakaan atau sakit yang kronis, dan jaminan pensiun bagi penduduk berusia di atas 65 tahun. Selain jaminan sosial tersebut, masih ada beberapa jaminan lainnya antara lain santunan untuk para pejuang dan veteran, bantuan untuk lansia yang tinggal sendiri, bantuan anak (child benefit) serta bantuan biaya hidup bagi mahasiswa.

Sebagai badan pelaksana adalah Ministry of Social Development, Ministry of Health, Ministry of Labour, dan Badan Kompensasi Kecelakaan (Accident Compensation Cooperation).



*Delegasi bersama Duta Besar
RI untuk Selandia Baru Tantowi
Yahya*

REKOMENDASI

- Indonesia harus membenahi tata kelola jaminan kesehatan sehingga jaminan kesehatan yang selama ini dikelola oleh BPJS tidak selalu merugi serta mampu mencakup semua kebutuhan kesehatan bagi masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
- Mengenai perlindungan perempuan dan anak, Indonesia perlu mencontoh Selandia Baru karena di Selandia Baru perlindungan perempuan dan anak sangat diperhatikan.
- Membuat regulasi mengenai pemakaian kantong plastik ataupun bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan yang harus segera dikurangi sehingga tidak mencemari lingkungan dan ekosistem.
- Benahi sistem pengelolaan air bersih baik penggunaan air tanah maupun penggunaan aliran sungai, sehingga kebutuhan akan air dapat dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat.
- Benahi sistem pengelolaan daerah aliran sungai terutama aliran sungai yang ada di kota-kota besar, berikan sanksi yang menimbulkan efek jera bagi yang mencemari aliran sungai baik perorangan maupun korporasi



KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE PAPUA NUGINI TANGGAL 25 - 31 AGUSTUS 2019

SUSUNAN DELEGASI



Dede Yusuf Macan Effendi, S.T., M.Si
Ketua Delegasi / F-PD

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan perorangan Anggota DPR RI ke Papua Nugini pada tanggal 25 – 31 Agustus 2019 dilakukan untuk mendapatkan informasi terkini tentang perkembangan situasi terkini dari hubungan bilateral antara Indonesia dengan salah satu negara tetangga terdekatnya tersebut. Poin-poin hasil pertemuan adalah sebagai berikut :

1. Isu Perbatasan dan Kedaulatan
Indonesia dan Papua Nugini sudah tidak memiliki masalah atau isu persengketaan pada isu perbatasan. Kedua negara sangat menghargai integritas teritorial masing – masing dimana batas darat kedua negara sepanjang 720 KM. Papua Nugini juga mendukung sepenuhnya kedaulatan NKRI, meskipun masalah Papua masih menjadi isu yang sensitif di Papua Nugini.
2. Bidang Ekonomi
Neraca dagang antara Indonesia – Papua Nugini menunjukkan peningkatan yang positif pada setiap tahunnya. Peluang usaha di Papua Nugini sangat terbuka lebar dimana sekarang ini beberapa produk Indonesia sudah menjadi unggulan di Papua Nugini. Jumlah ekspor Indonesia ke Papua Nugini setiap tahunnya sudah mencapai USD 120 juta. Produk-produk ritel Indonesia sudah banyak diperjualbelikan di Papua Nugini, seperti kebutuhan pokok, kertas, mie instan, dan suku cadang otomotif
3. Bidang Kesehatan
Papua Nugini telah melakukan reformasi khususnya di Bidang Kesehatan. Pada tahun 2011 – 2020, Papua Nugini memiliki visi akses kesehatan sampai pedesaan yang memiliki fokus untuk menekan angka kematian ibu dan bayi baru lahir, angka kematian balita, dan menurunkan jumlah pasien kanker. Upaya ini dimulai dengan program gerakan masyarakat sehat dan imunisasi. Namun demikian, seluruh fasilitas kesehatan di Port Moresby sekalipun tidak dapat dijadikan tolok ukur



Diskusi dengan Jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Papua Nugini dan Kepulauan Solomon

keberhasilan Papua Nugini dalam bidang kesehatan karena kondisi di provinsi-provinsinya jauh lebih tertinggal.

Saat ini KBRI telah melakukan peninjauan kerjasama di Bidang Sarana Kesehatan dan Farmasi, dimana saat ini Papua Nugini belum memiliki produsen obat dan vaksin seperti di Indonesia. Sejauh ini, fasilitas kesehatan di Jayapura sudah dijadikan rujukan warga negara Papua Nugini yang berdomisili di Vanimo karena lokasinya yang lebih dekat daripada ibu kota Port Moresby.

4. Migrant Workers

Kota Port Moresby Papua Nugini yang di desain sebagai kota industri sudah menjadi keniscayaan masuknya Tenaga Kerja Asing karena investasinya juga mayoritas berasal dari luar Papua Nugini, dimana negara-negara Asia Pasifik menjadi terbanyak penyumbang tenagakerja. Pada tahun 2019 Pekerja Migran asal Indonesia berjumlah sebanyak 3.000 orang. Standar Upah Minimum untuk pekerja lokal Papua Nugini sebesar 750 Kina atau setara dengan Rp. 3.000.000,- dan untuk ekspatriat atau pekerja migran dibayar lebih tinggi yaitu dua kali dari UMR KBRI di Papua Nugini. Sering menangani kasus perselisihan hubungan kerja dimana para pekerja migran Indonesia tidak diberikan hak-haknya oleh pemberi kerja di Papua Nugini.

REKOMENDASI

- Sebagai negara tetangga yang sudah lebih maju di bidang kesehatan dan sebagai bentuk kontribusi menjaga hubungan di perbatasan untuk itu kami mendorong Pemerintah Republik Indonesia agar membangun Fasilitas Kesehatan di Perbatasan baik Rumah Sakit ataupun Puskesmas yang dapat melayani warga kedua negara di perbatasan.
- Harus ada wujud nyata dari kerjasama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Papua Nugini, baik berupa pembangunan fisik, bantuan hibah obat dan vaksin serta Indonesia bisa mengirim dokter dan perawat yang sudah berstandar internasional untuk bekerja di fasilitas kesehatan Papua Nugini.
- Mendorong BUMN Indonesia (Biofarma dan Kimiafarma) untuk melakukan kajian peninjauan kerjasama di bidang Farmasi khususnya Obat dan Vaksin di Papua Nugini mengingat terbukanya peluang investasi di negara tersebut.



KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE YUNANI TANGGAL 25 - 31 AGUSTUS 2019

SUSUNAN DELEGASI



H. Yanuar Prihatin, M.Si
Ketua Delegasi / F-PKB

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan perorangan Anggota DPR RI dengan negara tujuan Republik Yunani pada tanggal 25 – 31 Agustus 2019 dilakukan untuk membahas berbagai isu strategis dan menjajaki peluang kerja sama yang selama ini belum terlaksana di antara Indonesia dan Yunani dan menjalin komunikasi dengan stakeholders strategis di Republik Yunani untuk kepentingan nasional Indonesia, serta untuk mendapatkan masukan dan pandangan bagi perumusan kebijakan luar negeri Indonesia dalam kaitannya hubungan diplomasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Republik Yunani. Agenda dan poin-poin hasil pertemuan antara lain :

1. Pertemuan dengan KBRI
 - 1.1. Bebas Visa
Terkait hubungan antar masyarakat kedua negara, penandatanganan bebas visa diplomatik memberikan jalan positif bagi kemajuan kerja sama antar kedua negara. Ke depannya, aturan bebas visa ini diharapkan berlaku pula bagi pemegang visa hijau.
 - 1.2. Bidang Maritim
Sebagai sesama negara maritime, penting bagi Indonesia dan Yunani untuk menjalin kerja sama yang sifatnya saling memperkuat perekonomian kedua negara terutama dalam meningkatkan akses kemaritiman di kawasan, khususnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
 - 1.3. Bidang Ekonomi
Penduduk Yunani yang berjumlah 13 Juta penduduk merupakan akses ekonomi yang potensial di Eropa. Yunani dapat dijadikan sebagai hub pintu masuk barang Indonesia di Eropa. Yunani yang terletak dekat dengan Asia dan Eropa dapat dijadikan tempat distributor barang khusus Eropa.



2. Kementerian Dalam Negeri Yunani

Dalam diskusi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri Yunani membicarakan masalah sistem pengelolaan Aparatur Sipil Negara di Indonesia dan Yunani yang hampir memiliki kesamaan. Yunani dituntut untuk merampingkan birokrasi (reformasi birokrasi), namun hal tersebut sangat sulit dilakukan mengingat birokrasi terlalu lama terjerat dalam mental Korupsi Kolusi Nepotisme dan rendahnya kinerja ASN. Ini salah satu pemicu krisis di Yunani mengingat belanja pegawai yang dikeluarkan oleh Pemerintah sangat besar.



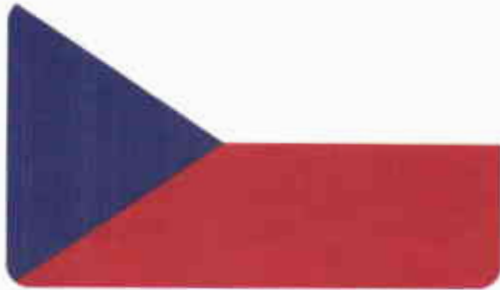
Pertemuan dan beramah tamah dengan Pihak KBRI



*Pertemuan dengan Pihak
Kementerian Dalam Negeri
Yunani*

REKOMENDASI

Indonesia dan Yunani sudah merintis beberapa kerjasama, yang perlu segera ditindaklanjuti Pemerintah Indonesia antara lain kerja sama dalam pembangunan kapal, penanganan kecelakaan kapal, wisata kemaritiman, dan energi terbarukan. Kedua negara melihat ada peluang kerja sama bidang pengelolaan pelabuhan dan logistik kemaritiman, pengembangan sumber daya maritim, perlindungan lingkungan dan langkah-langkah dalam mengatasi penangkapan ikan secara illegal.



KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE REPUBLIK Ceko TANGGAL 25 - 31 AGUSTUS 2019

SUSUNAN DELEGASI



Eko Wijaya
Ketua Delegasi / F-PD

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Perorangan Anggota DPR RI ke Republik Ceko pada tanggal 25 – 31 Agustus 2019 memiliki sejumlah tujuan, antara lain untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas hasil kerja Anggota serta untuk meningkatkan hubungan politik, ekonomi dan budaya di antara kedua negara.

Delegasi mengadakan pertemuan dengan beberapa pihak antara lain :

1. Dubes Indonesia untuk Republik Ceko Kenssy Dwi Ekaningsih untuk membahas sejumlah hal seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Poin-poin pertemuan antara lain :
 - Hubungan Bilateral
Hubungan bilateral Indonesia-Republik Ceko sudah terjalin cukup panjang dan cukup baik. Kedua negara seringkali melakukan pertemuan-pertemuan konsultasi dan peninjauan kerja sama baik yang diwakilkan melalui KBRI atau melalui pertemuan bilateral antar kementerian kedua negara. Menurut Duta Besar, kondisi ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk masa mendatang.
 - Isu Papua
Dijelaskan bahwa isu tersebut selalu muncul setiap akan diadakan Sidang Umum PBB. Hal tersebut selalu berulang dan akan hilang lagi ketika Sidang Umum PBB berakhir. Kondisi tersebut terjadi karena Gerakan Papua Merdeka butuh internasionalisasi isu sehingga momen Sidang Umum PBB merupakan momen yang tepat.



Pertemuan Delegasi DPR RI dengan Duta Besar dan Pejabat Konselor Bidang Politik KBRI Indonesia di Praha, Republik Ceko

- **Bidang Ekonomi**
Hubungan Indonesia-Ceko dibidang ekonomi juga berjalan cukup baik. Volume ekspor-impor kedua negara cukup tinggi. Beberapa produk ekspor Ceko ke Indonesia diantaranya yaitu produk olahan kaca, industri logam dasar dan elektronik. Sedangkan dari sisi Indonesia, terdapat produk ekspor ke Ceko seperti tekstil dan pakaian, produk olahan kayu, produk kertas dan olahan karet. Beberapa produk tersebut merupakan produk unggulan dari kedua negara yang sekarang sudah menjadi komoditas ekspor-impor. Selain kegiatan ekspor-impor, kedua negara saat ini sudah seringkali melakukan peninjauan investasi. Ceko sudah berencana untuk melakukan berbagai Investasi di Indonesia seperti dalam bidang baja dan tembaga di beberapa kawasan Industri di Indonesia.
- **Bidang Infrastruktur**
Dubes juga menjelaskan bahwa Indonesia dan Ceko tengah menjajaki kerjasama bilateral pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) di Indonesia. Pembangunan PLTM ini tentu saja sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan sumber energi baru terbarukan (EBTK) di Indonesia. Menanggapi hal itu, delegasi menegaskan dirinya akan mendorong agar RUU Energi Baru Terbarukan agar segera dibahas sehingga dasar hukum penggunaan energi baru terbarukan yang di dalamnya termasuk mikrohidro mempunyai kepastian hukum dan rencana ke depan yang jelas.
- **Bidang Sosial-Budaya**
Populasi Warga Negara Indonesia (WNI) di Republik Ceko cukup kecil, hanya sekitar 300 jiwa tersebar di seluruh Republik Ceko. Sebagian dari mereka merupakan mahasiswa yang menempuh studi di Ceko dan sebagian lainnya merupakan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan di Ceko. Dari sisi kunjungan wisata, Duta Besar menjelaskan bahwa Republik Ceko dalam lima tahun terakhir menjadi salah satu tujuan kunjungan wisatawan asal Indonesia. Setiap tahun tidak kurang seribu wisatawan asal Indonesia datang ke Ceko.

2. Pertemuan dengan Warga Negara Indonesia di Republik Ceko

Delegasi DPR RI mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari kelompok diaspora dan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI). Topik yang dibahas antara lain kualitas universitas di Republik Ceko, kemudahan akses dalam hal pendidikan, jaminan kesehatan, situasi politik terbaru di



Indonesia serta topik lainnya seperti pemindahan ibukota baru, infrastruktur dan moda transportasi yang terintegrasi.

3. Kunjungan ke beberapa obyek turis

Republik Ceko sangat ketat dalam pengelolaan wisata sejarah. Hampir 90% pariwisata di Praha ditopang oleh bangunan peninggalan sejarah yang dijaga keasliannya. Kemajuan pariwisatanya juga ditopang dengan kemudahan fasilitas untuk wisatawan seperti informasi terkait tempat pariwisata cukup banyak dan membantu para wisatawan yang datang, disediakan pemandu wisata dan audio guide dalam beberapa bahasa, sistem tikecting yang lebih modern dan kemudahan akses menuju tempat wisata.

Selain bangunan bersejarah, Republik Ceko juga mengelola industri pariwisata air yang memanfaatkan aliran sungai di Praha. Pengelolaan yang profesional seperti kelayakan kapal untuk wisatawan. Selain itu keselamatan wisatawan juga diperhatikan dengan adanya pelampung. Jadwal wisata juga tersedia mulai pagi sampai malam hari dengan variasi pelayanan yang berbeda.

Banyak hal yang bisa dipelajari dari industri pariwisata di Republik Ceko, antara lain : perlunya aturan yang ketat dalam pengelolaan pariwisata yang meliputi standar pelayanan pariwisata agar wisatawan merasa nyaman dan selamat; perlunya membangun infrastruktur pendukung seperti akses ke tempat pariwisata dan memperbanyak informasi-informasi terkait tempat pariwisata unggulan di Indonesia; dan perlunya mengangkat lagi pariwisata selain Bali. Program 10 Bali Baru yang dicanangkan Pemerintah merupakan program yang bagus dan patut didukung.



Kunjungan ke Industri Pariwisata Air di Praha



REKOMENDASI

- Pemerintah Indonesia perlu menguatkan kerja sama dengan Republik Ceko terutama terkait pelayanan sosial dan kesehatan dan juga pariwisata karena Republik Ceko termasuk negara dengan pelayanan sosial dan kesehatan dan pengelolaan pariwisata yang sudah baik.
- Rencana kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Republik Ceko terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga MicroHydro (PLTM) perlu ditindaklanjuti kembali mengingat Indonesia saat ini berusaha untuk mengalihkan sumber energi menjadi sumber energi yang baru dan terbarukan.
- Republik Ceko memiliki kualitas Perguruan Tinggi yang tidak kalah bagus dengan Negara lain, oleh sebab itu, perlu didorong agar mahasiswa dari Indonesia bisa lebih banyak mengambil beasiswa dan studi lanjutan ke Perguruan Tinggi yang ada di Republik Ceko.



KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE SELANDIA BARU TANGGAL 1 - 7 SEPTEMBER 2019

SUSUNAN DELEGASI



Ir. H. Daryatmo Mardiyanto
Ketua Delegasi / F-PDIP

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan perorangan Anggota DPR RI ke Selandia Baru pada tanggal 1 – 7 September 2019 dengan tujuan untuk mengetahui peluang kerja sama yang dapat dikembangkan dengan negara yang terkenal dengan berbagai produk olahan peternakan dan pertaniannya.

Secara umum, banyak dari contoh pengembangan kota di Selandia Baru yang dapat dicontoh oleh pemerintah Indonesia yang harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah penataan kota yang terintegrasi, pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, hingga menghormati dan menerapkan nilai dan budaya lokal sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sehingga tidak tergerus perkembangan zaman.

Dalam hal pengelolaan sumber energi di Indonesia, perlu ada peningkatan peran berbagai pihak seperti universitas dalam penyusunan rencana pengelolaan energi secara nasional mengingat universitas adalah salah satu lembaga penelitian yang sifatnya independen. Penyelesaian RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan juga perlu dipercepat agar pengelolaan energi terbarukan di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan target bauran yang telah ditentukan dan dijalankan melalui langkah-langkah yang sesuai.



Kunjungan ke pembangkit listrik tenaga angin di Brooklyn, Kota Wellington

Presentasi di dalam ruang rapat utama The Chamber, Gedung Parlemen





KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE INGGRIS TANGGAL 1 - 7 SEPTEMBER 2019

SUSUNAN DELEGASI



Dr. H. Zainuddin Amali, M.Si

Ketua Delegasi / F-PG

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan perorangan Anggota DPR RI dengan negara tujuan Inggris pada tanggal 1 – 7 September 2019 dilakukan untuk mendapatkan berbagai masukan terkait pengembangan hubungan bilateral di antara kedua negara, khususnya mengingat perkembangan situasi politik di kedua kawasan. Delegasi mengadakan pertemuan dengan Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia dan IMO dengan poin-poin hasil kunjungan antara lain:

1. Hubungan Bilateral

Pengembangan hubungan kerja sama Indonesia-Inggris berlandaskan kemitraan strategis melalui Joint Statement on Closer Cooperation Between the Republic of Indonesia and the United Kingdom and the Relaunch of Indonesia – UK Partnership Forum, yang diluncurkan oleh kedua kepala pemerintahan pada tanggal 11 April 2012 di Jakarta. Kemitraan strategis memfokuskan kerja sama bilateral di lima bidang prioritas yaitu: (i) Perdagangan, (ii) Investasi, (iii) Pendidikan, (iv) Lingkungan Hidup, dan (v) Demokrasi dan dialog lintas agama; serta tiga bidang tambahan, yaitu: (1) Pertahanan, (2) Industri kreatif, dan (3) Energi.

Terkait perkembangan hubungan bilateral kedua negara, delegasi mendapatkan informasi bahwa, pada tahun 2016, melalui kunjungan kenegaraannya, Presiden RI telah menyepakati beberapa bidang fokus kerja sama yang dinilai strategis dalam peningkatan hubungan ekonomi, yaitu perdagangan dan investasi, ekonomi kreatif, maritim, energi, dan dialog antar umat beragama.

Pada bulan Juni 2019, Menlu kedua negara juga melangsungkan Forum Kemitraan (Partnership Forum) di Inggris, yang menghasilkan kesepakatan antara lain Menlu RI menegaskan minat tinggi Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dalam pengembangan SDM melalui bidang pendidikan kejuruan, termasuk peluang magang bagi pelajar Indonesia di Inggris. Indonesia juga mengharapkan



Pertemuan dengan Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia dan IMO

diadakannya kerjasama dalam peningkatan kapasitas pengajar dan kualitas pendidikan di Indonesia secara umum. Kemungkinan untuk mengajarkan Bahasa Indonesia di sekolah-sekolah di Inggris juga menjadi salah satu hal yang diujai dalam pertemuan. Britania Raya juga memberikan dukungannya bagi jumlah mahasiswa asal Inggris yang mengikuti program Dharmasiswa. Selain itu peningkatan kerjasama ekonomi, investasi dan kesepakatan menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi secara reguler antara kepala negara dan pejabat tinggi negara.

Adapun beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan hubungan dan kerja sama Indonesia dan Inggris yang saling menguntungkan, antara lain dengan ketidakpastian situasi politik dalam negeri Inggris terkait dengan proses Brexit menyebabkan perhatian dan sumber daya Inggris terfokus sepenuhnya pada penyelesaian keluarnya Inggris dari UE, meskipun secara umum Inggris memandang Indonesia sebagai mitra penting di kawasan yang memiliki kesamaan nilai-nilai demokrasi, toleransi, sesama anggota G-20, dan UNSC.

Terkait dengan isu kedaulatan, keberadaan Benny Wenda dan dukungan beberapa anggota parlemen dan Dewan Kota menjadi salah satu tantangan tersendiri. Dalam hal ini, diberikan kebebasan pada Open Society sepanjang masih bergerak dalam kerangka hukum. Hal lain adalah keterbatasan jangkauan Inggris terhadap kawasan Asia Pasifik sehingga menyebabkan engagement yang begitu bergantung kepada negara persemakmuran di kawasan (Singapura, Brunei, Malaysia).

Dalam konteks Multilateral, keterwakilan Indonesia di organisasi internasional masih kurang termasuk di IMO (tercatat hanya ada 1 orang WNI yang bekerja di IMO). Skema magang/secondment telah ditawarkan untuk mengembangkan kemampuan pejabat Indonesia yang menangani isu maritim (misal: baik dari Kemlu/Kemhub) namun terkendala oleh belum adanya mekanisme di tingkat nasional untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut.



2. Pendataan dan updating WNI di wilayah akreditasi KBRI London

Terkait dengan pendataan dan updating data jumlah Warga Negara Indonesia di wilayah akreditasi KBRI London, termasuk status, profesi, dan pekerjaannya. WNI yang ingin mendapatkan layanan publik diharuskan lapor diri terlebih dahulu di aplikasi web KBRI London (www.consular.indonesianembassy.org.uk) sebelum mendapatkan akses untuk berbagai pelayanan publik yang tersedia pada aplikasi tersebut. Metode mengkaitkan lapor diri dengan pelayanan dimaksudkan untuk pendataan yang lebih akurat terkait dengan jumlah WNI di negara akreditasi secara real time dan membantu dalam proses pendataan WNI yang berhak menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Layanan ini telah mendapatkan sertifikasi ISO Inggris.

3. Pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 di Kedubes London, Indonesia

Terkait Pemilu Presiden serta Anggota Legislatif April 2019 lalu, KBRI Inggris melakukan pencoblosan di gedung KBRI London di Westminster hari minggu tanggal 13 April 2019. Untuk TPS LN sendiri, KBRI membangun 3 TPS dalam gedung KBRI. Jumlah pemilih yang tercatat 7.599 orang pemilih yang tersebar di Inggris dan Irlandia. Untuk yang menggunakan hak pilihnya dengan datang langsung ke TPSLN sebanyak 1.849 orang, sedangkan yang menggunakan hak pilih melalui pos tercatat sebanyak 5.750 orang, karena metode pemungutan suara boleh dilakukan secara langsung (datang ke TPS) ataupun dikirim melalui pos. Secara umum pelaksanaan pemilu di KBRI Inggris berjalan dengan lancar dan sukses berkat kerja keras seluruh elemen di KBRI Inggris dan juga PPLN serta KPPSLN. Perdana Menteri Inggris, Theresa May mengucapkan selamat atas suksesnya penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019.

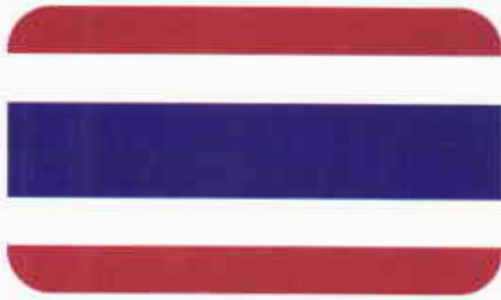
REKOMENDASI

- Peningkatan peranan Indonesia di OI atau penempatan wakil-wakil Indonesia dalam posisi-posisi berpengaruh misal sebagai Chair/Co-Chair dalam forum-forum internasional.
- Perlu adanya pendekatan melalui aktor-aktor non-negara (misal: pengusaha, parlemen, pelajar) untuk melakukan engagement dengan pihak-pihak berpengaruh di Inggris dalam hal isu kedaulatan yang dilakukan oleh pihak-pihak menuntut kemerdekaan di Papua Barat.
- Perlu segera ditindak lanjuti kesepakatan dalam pengembangan SDM, mengingat Inggris mempunyai kualitas pendidikan yang sangat bagus.



Peran Anggota DPR RI
dalam Penguatan Diplomasi Parlemen
pada tahun 2019





KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE THAILAND TANGGAL 7 - 13 SEPTEMBER 2019

SUSUNAN DELEGASI

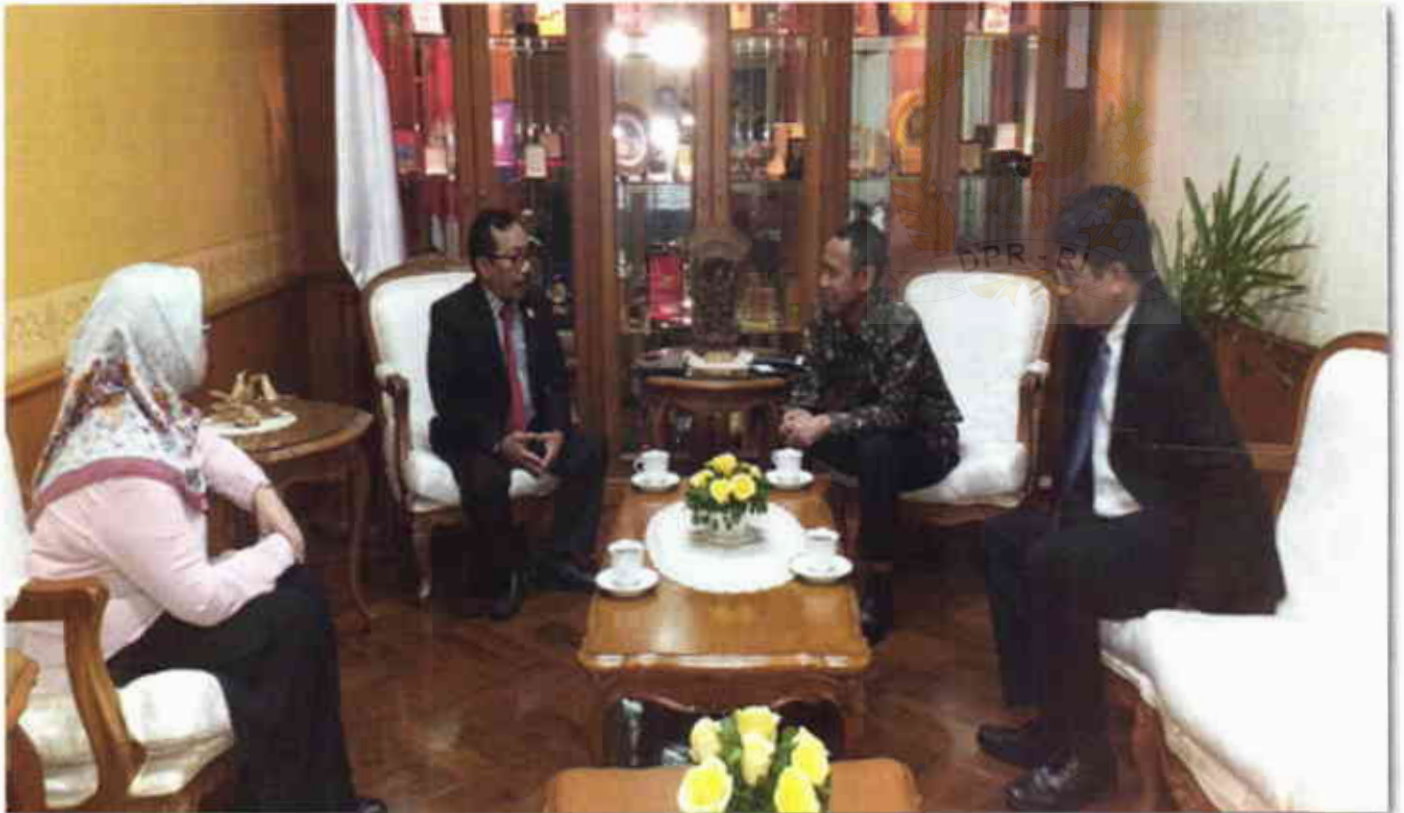


Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc
Ketua Delegasi / F-PDIP

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan Anggota DPR RI ke Thailand pada tanggal 7 – 13 September 2019 dilaksanakan dalam rangka diplomasi parlemen yang menjadi salah satu fungsi DPR RI untuk mendukung kebijakan luar negeri Pemerintah Republik Indonesia. Kunjungan ini juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif dari perkembangan sistem pemerintahan dan politik di Thailand. Poin-poin hasil kunjungan antara lain:

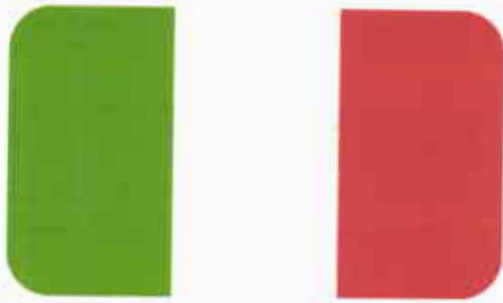
- Pembahasan mengenai sistem politik dan tata Pemerintah Thailand dimana guna memastikan berjalannya asas checks and balances, konstitusi menetapkan adanya dua perangkat keparlemen, yaitu Senat, dan lembaga tinggi negara yang terdiri dari lembaga setingkat KPU, National Counter Corruption Commission (NCCC), Mahkamah Konstitusi, dan PTUN.
- Terobosan lain dalam hal pemerintahan di Thailand adalah terkait pengangkatan menteri. Jika sebelumnya anggota parlemen yang didukung oleh kaukus atau fraksi tertentu dapat menjadi menteri, dalam tatanan pemerintahan baru ini, pengangkatan menteri sepenuhnya menjadi kewenangan Perdana Menteri. Menteri kabinet yang dipilih dari parlemen harus meletakkan jabatannya sebagai anggota legislatif.
- Untuk menghilangkan perdagangan suara yang dianggap sebagai musuh utama bagi demokrasi Thailand maka serangkaian perubahan ditempuh. Pandangan ini menilai bahwa perdagangan suara merupakan masalah hukum sehingga dalam penyusunan konstitusi, solusi dirancang dengan pendekatan legal-teknis.



Pertemuan dengan Pihak KBRI di Bangkok, Thailand

REKOMENDASI

alam rangka mencegah transaksi suara dan money politic dalam Pemilihan Umum penerbitan serangkaian regulasi diberlakukan di Thailand dengan tujuan mempersempit ruang untuk transaksi suara. Hal ini dapat diadaptasi dan dipelajari oleh Indonesia sebagai bahan perbandingan untuk menambah wawasan dan sharing knowledge.



KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE ITALIA TANGGAL 2 - 8 SEPTEMBER 2019

SUSUNAN DELEGASI



Dr. Ir. H. Dioko Udjiyanto, MM
Ketua Delegasi / F-PD



*Diskusi Bersama Pejabat Kedutaan Besar Italia (di Roma) dan Mahasiswa Indonesia yg ada di Italia.
Dihadiri juga oleh Duta Besar Negara Republik Indonesia Untuk Negara Vatikan*



HASIL KUNJUNGAN

Anggota DPR RI, Dr. Ir. H. Djoko Udjiyanto, M.M., melaksanakan kunjungan perorangan Anggota DPR RI dengan negara tujuan Italia pada tanggal 2 – 8 September 2019. Kunjungan dilaksanakan dalam upaya penajakan peluang kerja sama yang dapat dikembangkan antara Indonesia dan Italia. Sebagai pertimbangan dasar, Italia dikenal sebagai negara dengan industri kreatif yang cukup terkenal di seluruh dunia. Produk dengan label Made in Italy terkenal sebagai produk dengan karakteristik tersendiri, berkualitas tinggi, dan diakui dunia.

Ekonomi kreatif Italia melalui berbagai sektor industrinya mampu menyerap hampir sebanyak 1,5 juta individu atau 5,7% dari total tenaga kerja Italia. Angka ini pun terus meningkat 0,5% setiap tahunnya. Melihat fenomena ini, Indonesia sebetulnya berpeluang untuk dapat memasuki pasar ekonomi kreatif di Italia. Namun, hambatan yang masih ada terkait standarisasi dan ketatnya regulasi ketenagakerjaan di Italia. Oleh karena itu, pilihan yang dapat dipertimbangkan dan berpeluang adalah alih daya tenaga desain Indonesia.

Ke depannya, apabila kualitas bahan setengah jadi dan hasil karya alih daya tenaga desain Indonesia dapat diakui oleh berbagai perusahaan ekonomi kreatif Italia, maka hal ini akan menjadi jembatan untuk secara keseluruhan berkontribusi penuh melalui produksi dari Indonesia.



KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE MAROKO TANGGAL 8 - 14 SEPTEMBER 2019

SUSUNAN DELEGASI



Khatibul Umam Wiranu, M.Hum

Ketua Delegasi / F-PD

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan perorangan Anggota DPR RI ke Maroko pada tanggal 8 – 14 September 2019 dilaksanakan untuk mendalami praktik toleransi beragama di negara mayoritas Muslim tapi dengan tradisi yang hampir sama dengan kondisi dan suasana di Indonesia. Agenda dan hasil-hasil pertemuan antara lain:

1. Pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Maroko

Pertemuan juga dihadiri oleh pelajar Indonesia di Maroko. Jumlah pelajar di Maroko masih terbilang sedikit dibandingkan dengan beberapa negara Islam lainnya seperti Mesir, Turki, Yaman, Sudan, dan lain-lain. Padahal dari segi kualitas pendidikan, kampus-kampus di Maroko tidak kalah dibandingkan dengan kampus-kampus di negeri muslim lainnya. Salah satu sebabnya adalah kurangnya informasi tentang sistem dan kualitas pendidikan di Maroko buat pelajar (khususnya santri) di Indonesia. Pelajar Indonesia meminta agar Pemerintah lebih mempromosikan pendidikan Maroko di Indonesia agar lebih banyak lagi pelajar Indonesia menempuh pendidikan di Maroko. Mereka juga berharap dukungan maksimal dari para pihak, baik pemerintah maupun donator agar bisa ikut berpartisipasi dan menunjang mulai dari pengiriman sampai proses belajar selama di Maroko. Selama ini pengiriman mahasiswa Indonesia ke Maroko sebagian besar masih dikordinir oleh PBNU dan PP Muhammadiyah sehingga belum mendapat fasilitas tunjangan yang layak selama menempuh pendidikan di Maroko seperti biaya hidup, biaya perjalanan. Karena untuk pendidikan semua ditanggung oleh Pemerintah Maroko (gratis) baik untuk warga lokal maupun asing.



Pertemuan dengan tokoh agama di Tangier, Maroko, Prof. DR Abdul Mu'in Bin Abdul Aziz Al-Ghumari

2. Pertemuan dengan Prof. Dr. Idris Al-Fihri dari Universitas Al-Qurowiyyun di kota Fez

Selain mahasiswa muslim, Universitas Al-Qurowiyyun juga menerima mahasiswa non-muslim yang belajar di kampusnya. Dalam uraiannya beliau mengatakan bahwa Al-Qurowiyyun merupakan kampus modern tertua di dunia, karena di kampus inilah untuk pertama kali diperkenalkan model ijazah dalam sistem pendidikan. Sekalipun ini kampus Islam, tapi disini tidak ada larangan bagi non muslim untuk bisa belajar disini, asal memenuhi syarat yang berlaku, yaitu diantaranya adalah semua mahasiswa yang mendaftarkan harus hafal Al-Qur'an 30 juz, disamping ada syarat-syarat lain yang kategori sangat berat sekalipun untuk mahasiswa muslim.

Beliau juga menjelaskan suasana kerukunan antar umat beragama di Maroko yang harmonis, rukun, dan damai, ditengah isu dunia Islam yang kurang menggembirakan saat ini. Untuk itu, diharapkan, Maroko dan Indonesia bisa menjadi kiblat Islam yang ramah, toleran, taat dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam. Di Maroko terdapat komunitas Yahudi dan Kristen, khususnya Yahudi banyak dianut oleh warga asli keturunan Maroko, lain halnya dengan Kristen lebih banyak dianut oleh warga Maroko keturunan. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, mereka semua bebas menjalankan keyakinannya masing-masing. Hal itu ditandai dengan hampir disemua kota ada gereja dan sinagog untuk beribadah umat Kristen dan Yahudi. Kampus sebagai lembaga akademik juga mendukung tentang kebebasan beragama dan berfikir.

Salah satu upaya negara dalam mewujudkan kebebasan beragama adalah Kejaan Maroko memberlakukan konstitusi 2011, yaitu dimana rakyat Maroko bebas menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Konstitusi yang oleh sebagian kalangan dianggap bertentangan dengan isi pasal di dalamnya, dimana disitu tertulis orang Islam dilarang pindah agama. Sebagian menganggap paradox antara semangat kebebasan dengan larangan pindah agama, sekalipun begitu, sebagian orang menganggap ini ada kemajuan dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Dalam konstitusi lama, orang Islam yang pindah agama akan dihukum mati, sedangkan dalam aturan baru, orang Islam yang pindah agama "hanya" di penjara. Sehingga ada



sebagian orang ketika pindah agama, mereka akan melakukan secara diam-diam, hal itu tidak akan terlihat karena kehidupan masyarakat Maroko yang sekuler.

3. Pertemuan dengan Prof. Dr. Abdul Mu'in bin Abdul Aziz Al-Ghumari, seorang tokoh agama di Tangier

Beliau adalah ilmuwan terkenal di Maroko, sekaligus salah satu penasihat raja. Beliau menyampaikan bahwa suasana keramahan dan praktek keislaman Maroko dan Indonesia tidak ada banyak perbedaan dan memuji praktek toleransi yang dijunjung tinggi masyarakat Indonesia sehingga tercipta kerukunan dan keharmonisan ditengah-tengah masyarakat. Sehingga perlu belajar banyak dari Indonesia tentang menciptakan kerukunan antar umat beragama untuk di praktekan di Maroko.

Maroko berusaha untuk terus memperbaiki konstitusi maupun praktek toleransi, diantaranya adalah dengan memberlakukan Konstitusi 2011 untuk menghapus konstitusi lama. Dalam konstitusi baru, tertulis dengan jelas kalimat kebebasan beragama dengan menjalankan ajaran sesuai keyainan masing-masing. Sekalipun begitu, pemerintah Kerajaan Maroko dengan jelas melarang orang Islam pindah agama, melarang kegiatan misionaris, dan juga melarang tumbuh kembangnya ajaran radikal. Ini semua sebagai upaya preventif pemerintah untuk menjaga warganya dari suasana yang meresahkan warga. Deklarasi ini merupakan spirit Piagam Madinah yang pernah dibuat di era Nabi Muhammad, dimana umat Yahudi dan Nasrani merasa aman dan terlindungi dalam kekuasaan umat Islam.

Disisi lain, pemerintah kerajaan juga memproteksi ajaran Islam garis keras masuk ke Maroko, dengan cara mengawasi lembaga keagamaan maupun tempat ibadah. Dalam hal pendidikan misalnya, baik swasta maupun negeri wajib melaksanakan kurikulum negara dan bersifat tunggal, tentu aturan ini memiliki kelemahan dengan model penyeragaman, tapi cukup efektif dalam mencegah ideologi radikal diajarkan di sekolah maupun perguruan tinggi. Begitu juga dalam hal mengawasi aktifitas di tempat ibadah (masjid), masjid dilarang dibuka diluar jam sholat, praktek belajar di masjid (semacam madrasah diniyyah) dilarang, jikapun ada taklim (pengajian) harus seijin dan dam pengawasan pemerintah. Semua ini dilakukan dalam uapaya menangkal ajaran radikalisme masuk ke tempat ibadah maupun tempat pendidikan.

Salah satu upaya lain adalah, tepatnya bulan Mei 2019, pemerintah bersama tokoh antar umat beragama, dan aktifis masyarakat, mengadakan kegiatan multi keyakinan di Paroki Saint Jacques di Casablanca. Event yng juga di hadiri Uskup Agung Maroko Imam Besar Omar El Mrini dan Rahib Yahudi, juga di hadiri Negara-negara sahabat seperti Italia, Prancis, Burkona Faso, Norwegia, Kanada, Denmark, dan Vatikan. Lebih dari 200 orang tokoh agama dan masyarakat hadir, termasuk penasihat presiden untuk hubungan dengan non muslim Andre Azoulay. Penasehat raja mengatakan, ini adalah langkah nyata dan kongkrit dari raja untuk ketentraman warga Maroko. Selain itu, raja juga memerintahkan pengiriman Imam Muslim untuk disebarkan diseluruh Eropa dalam rangka menangkal radikalisasi warga Maroko yang tinggal di negara asing. Saat ini Pemerintah Kerajaan Maroko mengirimkan 422 orang (Ustadz dan Ustadzah) untuk menjadi imam dan ceramah di masjid-masjid yang banyak di datangi warga Maroko di Eropa. Kegiatan ini langsung dibawah kordinasi Menteri Wakaf dan Urusan Islam yang merasa perlu ada panduan agama bagi warga Maroko yang ada di perantauan.



REKOMENDASI

- Maroko dan Indonesia memiliki kesamaan pandangan dalam tradisi keagamaan, kehidupan beragama, dan komitmen yang tinggi dalam mencegah ideologi radikal;
- Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan praktik "penyeragaman" dalam sistem pengajaran agama di semua lembaga pendidikan. Hal ini tentunya dimaksudkan sebagai upaya pengawasan terhadap pengajaran pendidikan yang bertentangan dengan ideologi negara dan rawan mengancam keutuhan negara.
- Praktik mengirimkan pendakwah ke luar negeri perlu dipertimbangkan, khususnya ke tempat-tempat ibadah warga Indonesia, untuk mencegah timbulnya radikalisme sepulang mereka dari luar negeri. Radikalisme warga yang kembali dari luar negeri dapat diakibatkan oleh kurangnya pengawasan terhadap praktik kajian pada komunitas Indonesia yang difasilitasi oleh ulama yang tidak memiliki wawasan kebangsaan.
- Dalam mendukung paham Islam yang toleran, sebaiknya pemerintah Indonesia mulai melirik Maroko sebagai negara tempat belajar mahasiswa Indonesia. Dengan sistem pendidikan gratis, tentunya lebih mudah dan hemat untuk mengirimkan mahasiswa Indonesia ke Maroko daripada ke negara lain di Timur Tengah atau bahkan Eropa.



KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE AUSTRALIA TANGGAL 15 - 21 SEPTEMBER 2019

SUSUNAN DELEGASI



Dr. H. Almuzzamil Yusuf, M.Si
Ketua Delegasi / F-PKS

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan perorangan anggota DPR RI ke Australia pada tanggal 15-21 September 2019 salah satunya adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi diplomasi parlemen dengan mempromosikan Indonesia, menjalin persahabatan dengan negara-negara di dunia, serta mendorong peningkatan kerja sama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat, baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Agenda dan poin-poin hasil kunjungan antara lain :

1. Pertemuan dengan Parlemen Australia

- Canberra merupakan pusat pemerintahan Australia, Canberra. Selain Parliament House, terdapat pula kediaman resmi perwakilan Kerajaan Britania Raya (Gubernur Jenderal), Mahkamah Agung, dan berbagai departemen dan lembaga pemerintahan, lembaga sosial dan budaya nasional seperti Australian War Memorial, Australian National University, Royal Australian Mint, Australian Institute of Sport, National Gallery, National Museum dan National Library. Korps perwira Angkatan Darat Australia dilatih di Royal Military College, Duntroon. Australian Defence Force Academy.
- Australia mempunyai parlemen yang bikameral, masing-masing kamarnya adalah Senat, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Di dalam Senat (majelis tinggi), terdapat 76 senator. DPR (majelis rendah) terdiri dari 150 anggota yang dipilih dari 150 elektorat, artinya dari satu elektorat dikirim hanya satu wakil.
- Ada dua kelompok politik utama yang telah lazim membentuk pemerintahan, di level federal maupun negara bagian: Partai Buruh Australia, dan Koalisi yang merupakan pengelompokan resmi Partai Liberal Australia, dan mitra kecilnya, Partai Nasional Australia. Anggota-anggota



Pertemuan dengan National Capital Authority (NCA)

independen, dan beberapa partai kecil—termasuk di antaranya Partai Hijau Australia, dan Partai Demokrat Australia—memiliki wakilnya di parlemen Australia, terutama di majelis tinggi. Partai minoritas seringkali menjadi penyeimbang kekuasaan di Senat, yang berfungsi sebagai majelis kaji ulang keputusan-keputusan pemerintah.

2. Pertemuan dengan National Capacity Authoiry (NCA)

- Delegasi berdiskusi dengan pihak NCA untuk memperoleh masukan tentang bagaimana proses pemindahan ibu kota Australia ke Canberra, bagaimana respon warga negara Australia terkait pemindahan tersebut, dan bagaimana landasan hukum yang dibuat dalam pemindahan ibu kota tersebut. Hal ini terkait dengan rencana pemindahan Ibukota negara Indonesia ke Kalimantan Timur yang sedang ramai dibahas.
- Australia memiliki sejarah pemindahan ibu kota negara ke Canberra. Canberra berjarak 280 kilometer dari Sydney dan 660 kilometer dari Melbourne secara formal dibentuk pada tahun 1913, setelah dua tahun sebelumnya Australian Capital Territory (ACT) berdiri. Arsitektur Canberra adalah berasal Amerika Serikat, Walter Burley Griffin dengan bantuan istrinya sesama arsitek, Marion Mahony Griffin.
- Pada tahun 1906 team pemeriksaan mencatat bahwa Canberra akan dibangun gedung besar yang tinggi dengan pemandangan yang menarik. Sedangkan tahun 1911 Kementerian Dalam Negeri mengumumkan pembuatan desain ibu kota federal persemakmuran Australia. Ibu kota akan menjadi rumah parlemen australia, pusat kebudayaan dan departemen pemerintahan. Itu adalah esensi bahwa kota harus mengesankan warga negaranya dan para pemimpin dunia dengan keindahan dan desain fungsional.
- Dari tahun 1911, pemindahan para agen federal dipimpin mulai meningkat dengan hanya memiliki 422 populasi. Parlemen dipindahkan ke Canberra pada tahun 1927. Mereka adalah kepala dinas pemerintahan, staf pendukung. Pada 1940an, Orang-orang Eropa dan Inggris sebagai pekerja migran datang ke Canberra, membawa tenaga kerja dan usaha baru ke ibu



Pertemuan dengan Political Analyst, Parliament House Canberra

kota. Kemudian, masuk juga pekerja migran dari Asia, Afrika dan Timur-Tengah, sehingga membentuk masyarakat multikultural di ibu kota Australia. Setelah perang dunia kedua, banyak sekali migran yang datang untuk bekerja, sekitar 60.000 jiwa dari lebih 30 negara, terutama PBB meminta Australia menerima 100.000 orang-orang Eropa yang terlantar. Pembangunan memakan waktu 25 tahun, dari 1949 sampai dengan 1974. Ini adalah project yang paling signifikan sebagai upaya pembangunan kembali pasca-perang. Migran ke Canberra membentuk sosial, redaksional dan kultural atas ibu kota. Komisi Pembangunan Ibu Kota Nasional (NCDC) melanjutkan pembaharuan tampilan pembangunan ibu kota nasional seluruhnya tahun 1970an dan 1980an.

- Canberra adalah sebuah kota yang mewujudkan semangat bangsa Australia dan menandakan kehidupan masyarakat Australia dan prestasi.

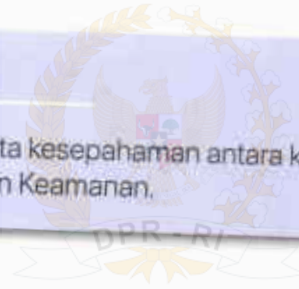
REKOMENDASI

Untuk pembangunan sebuah ibukota baru diperlukan persiapan dan pengembangan desain yang matang yang memperhatikan keseimbangan dari segala aspek seperti karakter dari sebuah ibukota, keindahan, ruang hijau, sanitasi, landscape, aliran air, penggunaan energi, modern, dan hal lainnya yang membuat sebuah kota yang benar-benar layak huni. Selain itu sebuah ibu kota mencerminkan pertimbangan keberlanjutan



REKOMENDASI

Diperlukan usaha bersama yang sistematis dan komprehensif serta kesepahaman antara kedua belah pihak dalam penanganan masalah global seperti hukum, HAM dan Keamanan.





KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE AFRIKA SELATAN TANGGAL 18 - 24 SEPTEMBER 2019

SUSUNAN DELEGASI



Anang Hermansyah
Ketua Delegasi / F-PAN

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI ke Afrika Selatan pada tanggal 18 – 24 September 2019 bertujuan untuk menggali berbagai persoalan yang menyangkut nasib WNI di negara tersebut serta untuk mempelajari keberhasilan mereka dalam pengembangan industri kreatif. Agenda dan poin-poin hasil kunjungan antara lain:

1. Pertemuan dengan Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Cape Town
Banyak warga negara Indonesia yang tinggal di Cape Town dikarenakan pekerjaan dan alasan tertentu. Jumlah yang terdaftar saat ini adalah sekitar 2000 orang. Selain itu, ada sejumlah isu, antara lain mengenai nasib anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang banyak tinggal di pesisir Cape Town. Tingkat pendidikan yang rendah menjadikan para ABK ini rentan menjadi korban penipuan oleh warga negara asing yang mengontrak mereka untuk menjadi ABK.
2. Kunjungan ke beberapa tempat wisata
Delegasi juga mengadakan kunjungan ke beberapa objek wisata di Cape Town yang tengah ramai diperbincangkan dan bisa diterapkan pada objek wisata di Indonesia. Objek wisata itu adalah Table Mountain, Pantai Boulders, Camps Bay, Aquila Private Game Reserve, Victoria and Waterfront, dan Robben Island. Pariwisata adalah salah satu dari beberapa sektor yang memiliki pertumbuhan signifikan untuk perekonomian Afrika Selatan yang sulit. Wisatawan Timur tengah banyak melakukan kunjungan ke Afrika Selatan, sehingga pariwisata halal bisa diterapkan pada aspek lainnya untuk menarik wisatawan Muslim. Menteri Ekonomi Western Cape untuk Pembangunan Ekonomi dan Pariwisata, telah memprioritaskan inisiatif pariwisata halal, mengingat sektor tersebut akan membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang menghasilkan lapangan kerja.



3. Kunjungan ke tempat ekonomi kreatif
Delegasi selanjutnya berkunjung ke sejumlah tempat ekonomi kreatif seperti ke Cape Point Ostrich Farm yang terletak tidak jauh dari Cape Point. Di peternakan ini, dalam industri ekonomi kreatif perajin menjual berbagai benda kerajinan, seperti telur burung unta yang sudah kosong namun belum dihias, tas, ikat pinggang, dompet, dan sepatu. Hasil kerajinan akan dikirim ke seluruh tempat wisata di Afrika Selatan dan menjadi cendera mata khas negara tersebut.

Delegasi mengunjungi salah satu sentra industri kreatif di Afrika Selatan

REKOMENDASI

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini digalakkan oleh pemerintah dan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa negara disamping sektor migas serta perluasan kesempatan serta lapangan kerja, dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya. Oleh karena itu semua stakeholder pemerintah baik eksekutif dan legislatif harus bersama-sama membangun pariwisata di Indonesia lebih serius dengan mempersiapkan infrastruktur, mental, serta belajar dari negara-negara lain yang berhasil mengembangkan pariwisata seperti Afrika Selatan yang didaulat sebagai destinasi terbaik di dunia dalam ajang penghargaan Traveler's Choice Awards 2012.



KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE MALAYSIA TANGGAL 19 - 25 SEPTEMBER 2019

SUSUNAN DELEGASI



Hang Ali Saputra Syah Pahan, S.H
Ketua Delegasi / F-PAN

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan perorangan Anggota DPR RI ke Malaysia pada tanggal 19-25 September 2015 dimaksudkan untuk bertukar pandangan lebih mendalam guna memperkuat kerja sama di berbagai bidang terutama di bidang kesehatan dan perlindungan di bidang Ketenagakerjaan. Agenda dan poin-poin hasil kunjungan antara lain:

1. Pertemuan dengan Perwakilan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia di Kuala Lumpur

Ada dua juta orang tenaga kerja asal Indonesia yang resmi bekerja di negara Malaysia saat ini, meskipun terjadi banyak kasus yang dialami para TKI seperti penyiksaan, pelecehan, dan deportasi, namun niat orang Indonesia untuk jadi TKI tidak pernah surut, disebabkan faktor himpitan ekonomi, lapangan kerja yang tidak merata dan memadai di Indonesia. Nilai tambah yang didapat para TKI di Malaysia adalah jaminan kesehatan baik dari Perusahaan Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) dari majikan dan negara sehingga mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai oleh pihak rumah sakit di Negara Malaysia.

Sebagai upaya memonitoring perkembangan dan perlindungan TKI asal Indonesia di Malaysia, pihak KBRI telah membuat sistem yang memfasilitasi pendataan WNI di Luar Negeri melalui fitur lapor diri, serta memudahkan WNI untuk mengajukan layanan baik secara online, maupun booking online untuk datang langsung ke perwakilan, serta memudahkan WNI untuk mengajukan pengaduan secara mandiri langsung melalui aplikasi sehingga keseluruhan WNI di Luar Negeri akan terdata secara detail, sehingga dapat memaksimalkan pelayanan dan perlindungan dari Perwakilan Indonesia di Luar Negeri.



Pertemuan dengan manajemen Putra Specialist Hospital Melaka

2. Kunjungan ke Putra Specialist Hospital

Berlokasi sentral di Melaka, Putra Specialist Hospital banyak dikunjungi oleh pasien dari Indonesia, terutama dari Riau. Setiap bulan sekitar 500 orang pasien asal Indonesia yang berobat disini. Putra Specialist Hospital mempunyai keunggulan antara lain:

- menawarkan pasiennya perawatan medis satu atap, dari pemeriksaan hingga operasi jantung, diberikan tiga hal yang paling penting: kualitas, perawatan kesehatan yang terjangkau dan tanpa menunggu.
- memberikan fasilitas penjemputan di bandara Melaka bagi pasien yang melakukan penerbangan agar dapat segera menemui dokter spesialis.
- memberi diskon sebesar 5% untuk Medical Check Up (MCU) dan rawat inap yang berlaku seumur hidup.
- menyediakan 40 tenaga dokter spesialis dari berbagai disiplin ilmu dan memberikan layanan spesialis antara lain pembedahan kardiovaskular dan torasik, saraf, kardiologi, bedah tulang, bedah umum, spesialis beda plastik dan kosmetik, bedah mulut dan gigi, Telinga, Hidung & Tenggorokan (THT), dll.

RS ini banyak mendapat kunjungan pasien dari Indonesia karena layanan kesehatan dengan kualitas internasional, biaya yang terjangkau, Kemudahan akses juga menjadi pertimbangan seperti jika ingin bertemu dengan dokter spesialis bisa kapan saja tanpa harus buat janji berhari – hari seperti di Indonesia. Rata – rata pasien Indonesia yang berobat disini adalah pasien dengan riwayat sakit jantung, kanker, dan orthopedi.

3. Kunjungan ke City Gallery Malaysia di Kuala Lumpur

Malaysia juga memiliki City Gallery yang menjadi bekas sejarah sekaligus proyeksi masa depan negara ini akan di bangun. Di komplek ini terdapat bangunan - bangunan tua yang kokoh tegak berdiri sebagai monumen sekaligus rekam jejak sejarah masa lalu negara ini yang dulunya merupakan pusat kantor percetakan pemerintah administrasi Inggris di Malaysia. Sekarang tempat ini dirubah menjadi galeri yang atraktif, dimana kita dapat melihat sekaligus mempelajari sejarah dan spirit kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dibangun dengan cara yang menyenangkan. Ada maket (miniatur) kota Kuala Lumpur dilengkapi tehnologi multimedia yang membantu kita memahami tata kota, rencana pengembangan, pertumbuhan serta Data mengenai sejarah dan demografi Malaysia secara utuh dan lengkap dapat terlihat disini.



Meninjau fasilitas Putra Specialist Hospital Melaka

REKOMENDASI

- Banyak peluang dan potensi di bidang kesehatan yang dapat di tingkatkan melalui hubungan diplomasi Indonesia dan Malaysia.
- Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia seperti mengurai benang kusut, dan perlu dicermati dan diberikan perlindungan serius oleh negara agar tidak terjadi lagi hal - hal yang dapat merugikan WNI yang bekerja di luar negeri.
- Pembangunan Kesehatan dan strategi marketing Health Tourism yang dilakukan oleh Malaysia merupakan salah satu cara untuk menambah penerimaan negara dari aspek kesehatan dan pariwisata, ini perlu juga dilakukan di Indonesia.



Peran Anggota DPR RI
dalam Penguatan Diplomasi Parlemen
pada tahun 2019





KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE SELANDIA BARU TANGGAL 18 - 24 SEPTEMBER 2019

SUSUNAN DELEGASI



Ir. H. Mulyadi
Ketua Delegasi / F-PD

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan kerja perorangan Anggota DPR RI ke Selandia Baru pada tanggal 18 – 24 September 2019 ini dalam rangka untuk mempererat hubungan di antara kedua negara dan memperkuat kerja sama antarpemerintahan. Adapun pihak yang akan dikunjungi adalah Duta Besar Negara Indonesia, Parlemen Selandia Baru, Kepala Imigrasi di Selandia Baru, Pelajar Indonesia di Selandia Baru dan Warga Indonesia yang berdomisili di Selandia Baru. Poin-poin hasil pertemuan antara lain:

1. Pertemuan dengan KBRI Selandia Baru

Selandia Baru memandang Indonesia sebagai mitra strategis. Hubungan bilateral Indonesia-Selandia Baru telah ditingkatkan menjadi kemitraan komprehensif, yang disepakati pada saat kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Wellington dan bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern pada Maret 2018.

Menanggapi krisis di Papua, KBRI berharap agar segera bisa diatasi agar tidak menimbulkan sentimen negatif dari negara lain. Peristiwa penembakan jamaah masjid di Christchurch di Selandia Baru bisa dijadikan contoh bagaimana pemimpin suatu negara dapat menyelesaikan masalah insiden antara umat beragama dengan damai. Saat itu PM Jacinda Ardern dengan mengenakan kerudung langsung berbicara di tempat kejadian. Jacinda Ardern menyampaikan statemen yang sangat tepat, sangat cepat mengingat kejadian penembakan tersebut berpotensi untuk merusak hubungan antara Kristen dan Islam. Jika tidak ada tindakan yang cepat, tepat dan bisa mengambil simpati dari korban bisa jadi hubungan antara Kristen dan Islam berantakan.

KBRI juga menyampaikan bahwa banyak pihak di Indonesia khususnya Pemerintah Daerah yang belum tahu atau belum mau memberdayakan KBRI Wellington sebagai perwakilan Indonesia di



Selandia Baru. Tugas utama setiap perwakilan adalah membangun konektivitas ekonomi dengan Indonesia. KBRI adalah perwakilan sekaligus pemasar untuk berbagai produk dari daerah-daerah di Indonesia. Bagaimana caranya agar setiap potensi di daerah bisa dihubungkan ke Selandia Baru dan sebaliknya, tidak harus melalui pemerintah pusat. Pemerintah daerah seharusnya proaktif menghubungi perwakilan negara dan KBRI akan sangat senang untuk membantu sehingga apapun info maupun peluang akan disebarluaskan atau misalnya ada even yang bisa dihadiri.

Sebagai negara yang sama-sama rentan terdampak bencana karena secara geografis berada di wilayah cincin api, Indonesia banyak belajar mengenai mitigasi bencana dari Selandia Baru. Indonesia telah «meminjam» standar bangunan tahan gempa Selandia Baru sejak 1975, menjadi salah satu contoh kerja sama yang penting dalam bidang mitigasi bencana.

2. Kunjungan ke Parlemen Selandia Baru

Kunjungan ke parlemen mendapat sambutan hangat. Delegasi diterima oleh Ketua Kerja Sama Parlemen Selandia Baru Kanwaljit Singh Bakshi dan Anggota Parlemen Selandia Baru Greg O'Connor, Melissa Lee, Tim Machindoe, serta Duta Besar Selandia Baru Jonathon Austeen. Mereka menawarkan kerja sama untuk meningkatkan kultur budaya, bahasa, kesenian dan juga sport dimasa yang akan datang. Dengan kerjasama tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan kedua negara dan bisa menumbuhkan nilai ekonomi, trading dari ekspor impor dari neraca perdagangan menuju ke arah yang positif.

Hubungan Indonesia dengan Selandia Baru sudah terjalin dengan baik dari sektor pariwisata. Setidaknya, tren kunjungan wisatawan Selandia Baru meningkat 20,03 persen dari tahun sebelumnya dengan total 128.324 orang sepanjang 2019 lalu di Indonesia.

3. Kunjungan Kantor Imigrasi di Selandia Baru

Delegasi DPR RI berkunjung ke Imigrasi di Selandia Baru dan diterima oleh Rito Triumbarto selaku penanggung jawab untuk memberikan penjelasan yang lebih teknis. Di Kantor Imigrasi telah diterapkan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dalam pelayanan pembuatan Paspor RI.

4. Silaturahmi dengan WNI dan Pelajar Indonesia di Selandia Baru

Pertemuan dilaksanakan di It's Java Cafe yang merupakan tempat perkumpulan Warga Negara Indonesia dan Pelajar Indonesia di Auckland. KBRI juga pernah menyelenggarakan acara "Kumpul Warga", sebuah kegiatan di mana warga negara Indonesia di Selandia Baru memiliki kesempatan untuk bertemu dan menyuarakan aspirasi mereka kepada Duta Besar. Pertemuan dihadiri oleh Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Warga Negara Indonesia di Selandia Baru. Interaksi budaya yang meningkat antar masyarakat kedua negara diharapkan juga akan meningkatkan better understanding dan deeper friendship, komunitas-komunitas Indonesia Seni Budaya di Selandia Baru akan strategis dalam meningkatkan profil Indonesia di Selandia Baru dan dapat menjadi cikal bakal pembukaan pusat Indonesia di negara lain. Saat ini, jumlah warga Indonesia di Selandia Baru diperkirakan mencapai 5.500 orang



REKOMENDASI

- Diharapkan ada kunjungan khusus dari Indonesia terkait perusahaan geothermal, agar dilakukan pembelajaran secara komprehensif, karena keahlian Selandia Baru pada bidang ini sangat membantu dalam pengolahan kekayaan sumber daya geothermal yang ada di Indonesia.
- Kerjasama Indonesia dan Selandia Baru, khususnya hubungan antar masyarakat kedua negara masih perlu dieksplorasi, contohnya industri digital karena Selandia Baru sangat terkenal dalam bidang ini. Pertanian berkelanjutan, ekonomi kreatif, perikanan, dan penanggulangan bencana juga menjadi bidang-bidang yang diunggulkan Selandia Baru, dan dan berpotensi membuka kerjasama dengan Indonesia.





KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN ANGGOTA DPR RI KE EKUADOR TANGGAL 19 - 25 SEPTEMBER 2019

SUSUNAN DELEGASI



Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H
Ketua Delegasi / F-PDIP

HASIL KUNJUNGAN

Kunjungan perorangan anggota DPR RI ke Ekuador pada tanggal 19-25 September 2020 dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara komprehensif dari Lembaga yang menangani tindak pidana korupsi di Ekuador, diantaranya ruang lingkup, kewenangan dan Undang-Undang yang mengatur lembaga tersebut dan perkembangan sistem pemerintahan dan sistem politik di Ekuador. Dalam pertemuan dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Ekuador menghasilkan poin-poin antara lain:

1. Bidang Ekonomi

Industri kelapa sawit di Ekuador, dimana Ekuador merupakan salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, dengan volume minyak sawit 630.000 ton. Kelapa sawit mulai dikenal di Ekuador sejak tahun 1953, bibitnya dibawa dari Honduras. Perkembangan industri sawit di negara ini berjalan lambat hingga tahun 1994. Ekuador baru bisa mengekspor 4000 ton minyak sawit. Sejak saat itu perkembangan sawit mulai menanjak hingga tahun 2010 luas perkebunan sawit Ekuador telah mencapai 250 hektar, berkembang sekitar 7% setiap tahunnya.

2. Penegakan Hukum

Di Ekuador penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan harus berdasarkan permintaan seperti dari kepolisian dan Kejaksaan yang harus ditetapkan berdasarkan UU.

Dalam hal pemberantasan korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan bekerja sama dalam memberantas kejahatan korupsi dan menindak tegas terhadap tindak pidana tersebut. Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana dan sistematis dan merupakan



Pertemuan dengan Duta Besar Indonesia untuk Republik Ekuador

pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik, merusak sendi-sendi ekonomi nasional, serta merendahkan martabat bangsa di forum internasional.

Terkait hukuman bagi pelaku kejahatan narkoba, hukum di Indonesia lebih berat dengan menerapkan pemberian hukuman mati bagi kasus tindak pidana peredaran narkotika, sedangkan di Ekuador hukuman bagi kasus tindak pidana narkoba hanya 1,5 tahun kurungan penjara.

3. Perlindungan Anak dan perempuan

Dalam hal perlindungan anak dan perempuan, pemerintah Ekuador menjamin perlindungan tersebut. Sehingga, apabila terjadi kekerasan terhadap anak dan perempuan, pihak Kepolisian akan menindak tegas pelaku kekerasan tersebut. Namun, seiring dengan hal tersebut tindak kriminal seksual juga masih banyak terjadi.

4. Pelayanan Publik

Terkait dengan pelayanan publik, di Ekuador pelayanan publik sudah cukup bagus. Pemerintah mengembangkan ruang terbuka hijau seperti, taman kota yang secara rutin dipergunakan sebagai tempat festival budaya dari berbagai negara, taman bermain untuk anak-anak, tempat olahraga dll. Selain itu taman dilengkapi fasilitas umum yang sangat memadai untuk membuat kenyamanan masyarakat dan selalu dijaga kebersihannya. Fasilitas lainnya yang diberikan pemerintah Ekuador secara gratis adalah dalam bidang pendidikan sekolah dan dalam bidang kesehatan.

5. Toleransi Beragama

Jumlah Penduduk Equador sebesar 19 juta, 94 persen penduduk Ekuador adalah penganut Katolik, dan setidaknya ada sekitar 0,13 persen atau 19 ribu muslim. Meskipun muslim termasuk komunitas minoritas di Ekuador, namun toleransi beragama antar warga berjalan dengan baik.



REKOMENDASI

Diperlukan usaha bersama yang sistematis dan komprehensif serta kesepahaman antara kedua belah pihak dalam penanganan masalah global seperti hukum, HAM dan Keamanan.



**HARAP BUKU INI DIKEMBALIKAN PADA
TANGGAL :**
